



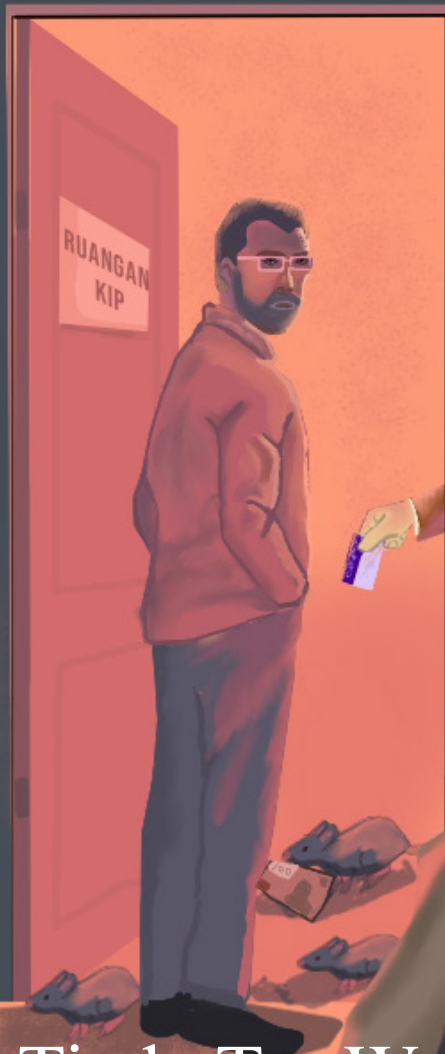
Media Mahasiswa

# WASHILAH

Untuk Peningkatan Perilaku Islami Penggalakan Kualitas Ilmiah, dan Pembobotan Idealisme

Tabloid Edisi 122

# KIP Kuliah Marak Calo



Hal. 6

Ada dan Tiada Tes Wawancara,  
Penentuan UKT Tetap Rancu

Hal. 9

Pemecah “Telur” Guru Besar  
FKIK



washilah\_uinam



Washilah Uinam



Washilah



www.washilah.com

# Bukan Wayang



Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Informasi Mahasiswa Alauddin (LIMA) Periode 2023 | Foto: Washilah - Arsip.

“Sang dalang sudah menaruh wayang atau boneka kulit itu di dalam kotak.

Penonton sudah bertepuk tangan. Gong sudah dibunyikan. Tanda lakon mulai dimainkan. Tapi kita bukan boneka kulit itu!” Begitu kata Sapardi dalam puisinya.

Siapakah sang dalang itu? Apakah penguasa? Maksud kami, penguasa yang memegang kendali atas hal-hal yang seharusnya ditimbang dan disepakati bersama. Lalu kita akan serupa boneka yang dimaksud oleh Sapardi. Ketika gong sudah dibunyikan, sang dalang akan memulai semuanya, dengan kehendaknya, menggerakkan wayang semauanya.

Kami tak ingin menjadi boneka seperti itu. Kita harus memulai sendiri suatu lakon. Bukan menjadi lakon yang digerakkan sang dalang. Lalu sampai mana kita mencoba untuk tak menjadi boneka itu? Atau barangkali kita sudah menjadi boneka itu.

Lihat saja kemarin, pungutan liar dalam PBAK dilahap habis oleh beberapa wayang berseragam mahasiswa. Mereka kah boneka yang dimaksud itu? Atau mereka mencoba meniru laku sang dalang. Mereka meneng-

gak anggur beracun yang ditanam sang dalang di taman bermain.

Tak hanya itu, boneka lainnya bahkan sudah merambat hebat, menjelma penjilat ‘pantat’ penguasa. Sang dalang seolah tak ada celah dan dosa. Ia menjadi agung di mata dan mulut mereka yang boneka.

Skenario sang dalang memang hebat. Ia peramu yang handal. Namun, siapa yang ingin menjadi pecundang, lalu digerakkan sebagai boneka oleh sang dalang. Sungguh, kami akan merangkak dari bawah, meski dengan gerak yang terbatas, walau patah, walau luka menganga, bahkan hingga nadi tak lagi berirama. Kami menolak menjadi boneka itu.

Untuk itu, di awal November ini, Washilah kembali mempersembahkan Tabloid Edisi 122, sebagai usaha tak menjelma boneka.

Tiada harapan yang lebih mulia, dari semoga tabloid yang ada di tangan pembaca memberi manfaat bagi pembaca. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada narasumber yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tabloid ini. Kepada dewan

senior, pengurus, anggota biasa, dan anggota muda UKM LIMA Washilah. Terima kasih karena telah menemani dalam suka dan duka sehingga tabloid ini dapat terselesaikan.

Kami sepenuhnya sadar jika tabloid ini masih jauh dari kata sempurna, bagaimanapun kami telah berusaha dengan maksimal dan berusaha bekerja secara profesional. Maka dari itu, kami tiada henti meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Dengan asa yang senantiasa dirawat oleh seluruh elemen awak Washilah, tabloid ini hadir sebagai upaya untuk selalu mengabarkan berita aktual dan faktual di kampus yang memasuki usia 58 tahun ini. Pada laporan utama, kami mengulik komersialisasi KIP Kuliah antara calo dan mahasiswa. Pada rubrik sorot, kami menyajikan bagaimana penentuan UKT mahasiswa dengan adanya tes wawancara atau sebaliknya. Sementara rubrik lipsus, kami menampilkan beban kuliah lapangan yang ditanggung kepada mahasiswa. Selamat membaca! Selamat Milad UIN Alauddin Makassar!

## - TAJUK -

### Rahasia Umum

Ada yang bergeliat di bawah tanah, menyerap hara di permukaan. Menjadi gulma juga parasit. Ada pula yang menjadi ratu menjebak para semut-semut untuk diperbudak mengenyangkan dirinya seorang.

Sungguh, calo KIP Kuliah memang rahasia umum. Sebab hal ini bukan hanya terdapat di UIN Alauddin, di beberapa kampus di Indonesia juga ada. Cara mendapatkan pelanggan KIP pun hampir sama. Semua meraup keuntungan, dengan angka yang tentu bukan ecek-ecek. Bayangkan, satu calo memegang 10 kuota KIP. 1 kuota dihargai Rp2,5 juta. Hasilnya Rp25 juta rupiah, dalam sekali penerimaan KIP di tiap semesternya.

Angka itu bisa jadi lebih dari yang telah disebut. Jumlahnya bisa lebih melangit. Uang yang seharusnya diberikan pada mahasiswa untuk kebutuhan hidup selama berkuliah dijadikan keuntungan perut seorang, kongko-kongko atau barangkali pejabat kampus. Entah siapa.

Mirisnya, beberapa mahasiswa yang mampu secara ekonomi pun turut meramaikan kuota KIP yang seharusnya diperuntukkan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Hal ini sering disebut “jalur orang dalam/keluarga”.

Mahasiswa yang membutuhkan KIP jadi kalang kabut dibuat para calo. Bagaimana tidak, jika mereka tak menggunakan calo, peluang lulus seperti benang halus, tipis. Tiada jalan lain untuk bisa berkuliah, beberapa mahasiswa pun menghalalkan lulus lewat calo. Mau bagaimana lagi, “dari pada *nda* dapatka KIP, lalu *nda* bisa kuliah. Ya, mending calo,” ungkap Surti.

Orang tua Surti hanya seorang petani, penghasilannya tak seberapa, tanggungannya pun banyak. Untuk bisa berkuliah, ia harus mendapatkan beasiswa. Salah satunya ialah KIP Kuliah yang merupakan program pemerintah untuk putra-putri Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Namun nahasnya, program ini dijadikan ladang bisnis bagi beberapa oknum.

Surti tak punya jalan lain. Begitu juga dengan beberapa mahasiswa lainnya. Mereka dihadapkan pada pilihan yang berat dan menjebak. Siapa yang merakit jebakan ini? Pihak lain di luar otoritas kampus? Tentu bukan!

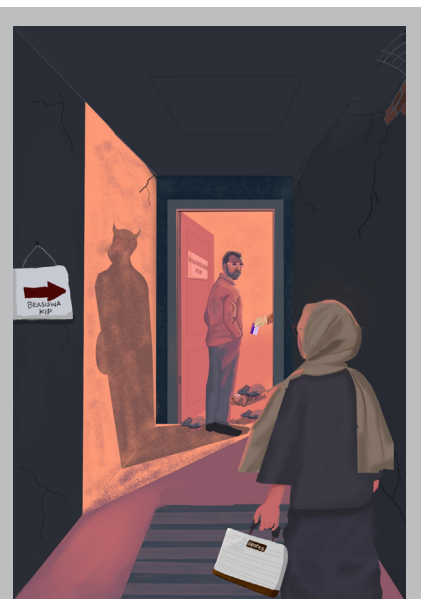


Diterbitkan sesuai SK Rektor UIN Alauddin Makassar No. 177 tahun 2023 | **Pelindung dan Penasehat:** Rektor UIN Alauddin Makassar | **Penanggung Jawab:** Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar | **Dewan Pembina:** Andi Al Qadri, Faisal Mustafa, Muhammad Fahrul Iras, Muhammad Aswan Syahrin, Arya Nur Prianugraha, **Dewan Pakar:** M. Shoalihin, Pelita Nur, NUR Afni Aripin, Nadia Hamrawati Hamzah, Fikri Mauluddin, **Pimpinan Umum:** Jushuatul Amriadi | **Sekretaris Umum:** Heni Handayani | **Bendahara Umum:** Sugiya Selpi R | **Direktur Pemberitaan:** Irham Sari | **Direktur Litbang:** Saldi Adrian | **Direktur Operasional:** Kardiman Aksah | **Direktur Media Sosial:** Heny Mustari | **Direktur Artistik:** Ismail HM | **Direktur Dana dan Usaha:** Khusnul Fatimah | **Redaktur Daring:** Nabila Rayhan | **Redaktur Tabloid:** Rahmat Rizki | **Redaktur Penyiaran:** Firda | **Redaktur Fotografi:** Charissa Azha Rasyid | **Redaktur Audio Visual:** Ahmad Bilal | **Bidang Pengembangan SDM:** Astiti Nuryanti | **Bidang Desain dan Layout:** Asrianto | **Bidang Periklanan:** Hilda Nurfaidah | **Reporter:** Nabila Safnas, Andi Muh Saleh, Muh Iskar, Arham, Rahmat Hidayat, Sriwahyuni, Desviana, Bulqis Latifa Wahab, Muh Azhar S Putra, Malebbi Salsabila, Khalifah Tahirah.

Suara  
Pembaca!



Untuk produk jurnalistik yang lebih baik lagi, kami menyediakan ruang untuk suara pembaca. Kirim kritik dan saranmu dengan *scan barcode* ini.



Ilustrasi dan Layout: Ismail HM, Andi Muh Saleh dan Asrianto

# KIP Kuliah Marak Calo

**Washilah** - Karena persoalan ekonomi, Surti tidak pernah terpikir bisa berkuliah. Namun ia mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski dengan cara yang tidak pintar.

Surti (Bukan nama sebenarnya) lulus di bangku SMA 2022 lalu. Kala itu, ia sadar betul dengan ekonomi keluarganya. Hanya ada dua pilihan waktu itu, “Cari kerja atau membantu Ibu di rumah,” kata Surti kepada Washilah, Senin (14/8/2023).

Ayahnya seorang petani, sedang ibunya hanya punya kedai kecil di rumah. Keuntungan keduanya pun hanya cukup menutupi keperluan sehari-hari. Belum lagi ketiga saudaranya yang masing-masing masih duduk di bangku sekolah—semua butuh biaya.

Niat untuk berkuliah belakangan datang dari gurunya di SMA. Sang guru memberitahu Surti untuk mendaftar kuliah lewat jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PT-KIN), sebab ia dinilai berprestasi selama bersekolah.

“Coba saja, kalau lolos, bisa daftar KIP Kuliah,” ucap Surti menirukan gurunya.

Surti baru tahu tentang KIP Kuliah. Ia banyak bertanya pada gurunya waktu itu. Gurunya pun menjelaskan kepada Surti, bahwa KIP Kuliah merupakan program pemerintah untuk mendukung mahasiswa mendapatkan pendidikan tinggi, dengan syarat penerima memiliki potensi akademik yang cukup baik dan memiliki keterbatasan ekonomi dengan didukung bukti dokumen yang sah.

Setelah menerima penjelasan dari gurunya, Surti lantas mencari tahu lebih jauh tentang KIP Kuliah lewat Internet. Bermodal ponsel, Surti berselancar di laman resmi Kementerian Agama. Di sana, ia membaca dan mencatat syarat apa saja yang dibutuhkan sebagai calon penerima KIP Kuliah.

Selain syarat dijelaskan gurunya, Surti mencatat beberapa syarat calon penerima KIP Kuliah. Setelah mengetahui syarat-syarat itu, ia menyadari dirinya memenuhi kriteria.

Harapan Surti untuk bisa berkuliah seketika terbukti. Bermodal harapan “KIP Kuliah,” Surti pun mencoba mendaftar di UIN Alauddin Makassar.

Kabar kelulusan pun tiba, bulan April 2022 lalu. Surti diterima sebagai mahasiswa baru angkatan 2022.

Mendengar kabar itu, gurunya turut senang, tapi tidak dengan Surti. Kepalanya mumet, memikirkan bagaimana menyampaikan kabar kelulusan kepada orang tuanya. Walau ia dapat menggunakan kata “beasiswa” sebagai penenang, bahwa dirinya bisa berkuliah tanpa memberat-

kan kondisi keluarga. Tapi Surti tak yakin, peluang menerima KIP Kuliah masih setitik debu.

“Ma’ luluska kuliah di UIN, kuambil atau janganmi?” ucap Surti kepada ibunya, 2022 lalu.

“Ambil mi saja nak, soal rezeki datang sendiri ji itu,” balas ibunya meyakinkan Surti untuk tetap berkuliah.

Kendati begitu, hati Surti tetap berat, ia kelimpungan membayangkan bagaimana bila dirinya tak lulus sebagai penerima KIP Kuliah?

Bagaimana dengan biaya kuliah dan hidupnya di kampus nanti?

“Bayar UKT, makan, sewa kost, dan biaya

kuliah lainnya,” kata Surti.

Dengan harapan yang tipis, Surti melakukan registrasi—daftar ulang—di PMB-UIN Alauddin, juga untuk menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diterimanya sebagai mahasiswa. Setelah melakukan pendaftaran ulang, besaran UKT yang diterima Surti pun keluar.

Ia mendapatkan kategori II, sebesar Rp1,8 juta. Besaran UKT yang Surti dapatkan terbilang rendah, hanya kat-

egori II, dari tujuh kategori yang ada. Paling rendah ada di angka Rp400 ribu sedangkan kategori VII, ada di kisaran Rp5 juta Satu tahap lagi bagi Surti—membayar UKT.

Surti beruntung, kala itu ibunya datang memberinya uang, “ini ada tabungannya mama, pergi bayar uang kuliahmu,” ucap ibunya.

Belakangan, Surti baru tahu uang itu berasal dari cincin emas milik ibunya, yang dijual untuk melunasi uang kuliah miliknya. Hal ini jadi alasan kuat bagi Surti, untuk lulus sebagai penerima KIP Kuliah—“apapun caranya.”

Tiga bulan pasca pengumuman diterima di UIN Alauddin Makassar, Juli 2022, pendaftaran calon penerima Beasiswa KIP Kuliah dibuka secara online. Hal yang dinanti Surti pun tiba, ia mendaftar, melengkapi setiap berkas dan persyaratan yang diwajibkan sebagai calon penerima beasiswa. Surti memenuhi semua syarat yang dibutuhkan.

“Bismillah,” harapnya.

Walau begitu, Surti merasa tak percaya diri, ia ragu tidak terpilih sebagai penerima KIP Kuliah. Kesempatan itu hanya datang sekali. Rasa pesimis Surti bukan karena dirinya tak memenuhi syarat, melainkan karena kuota penerima KIP Kuliah hanya sebanyak 700 orang saja. Angka itu naik dibanding tahun sebelumnya (2021) yang hanya 500 penerima.

Seperti Oase di tengah gurun yang kering. Di tengah batin yang ragu itu, Surti menerima satu pesan *WhatsApp*. Seorang yang mengaku sebagai calo mengatakan bisa membantunya mendapatkan KIP Kuliah.

Tawaran itu bukan tanpa syarat. Jika Surti bersedia, uang yang ia terima dari KIP Kuliah tiap semester harus dibagi dua. Atau selama delapan semester berkuliah.

Besaran bantuan yang diterima penerima KIP Kuliah adalah sebesar Rp6,6 juta rupiah. Jumlah itu kemudian akan dialokasikan sebesar Rp2,4 juta untuk biaya kuliah (UKT), dan sisanya, Rp4,2 juta untuk *living cost*.

Jika saja Surti menerima tawaran itu, uang KIP Kuliah yang akan ia kantonginya hanya tersisa Rp2,1 juta rupiah.

Mendapatkan tawaran itu, Surti terbelalak penuh semangat. Matanya menyalang, degup jantungnya kencang berdetak.

Meski uang KIP Kuliah yang ia terima akan dipotong nantinya, Surti sepakat mengambal tawaran dari sang calo. Ia tak keberatan sama sekali. Menurutnya, menggunakan jasa calo menjadi solusi terakhir untuk bisa berkuliah di Kampus Peradaban.

“Nda keberatan ja, malah terbantu sekali ka. Dari pada nda lulus ka KIP, terus berhenti kuliah, mending pakai calo,” tegas Surti.

“Semangat sekali ka waktu itu, besar harapanku bisa lanjut kuliah,” ujar Surti.

Data pribadi Surti pun diminta oleh sang calo. Surti memberinya dengan senang hati. Calo itu berjanji, nama Surti akan lulus seleksi dan dipilih sebagai penerima KIP Kuliah tahun itu.

“Yakin saja, seratus persen lulus ini. Tapi harus sesuai kesepakatan nah,” kata Surti, menirukan calo yang meyakinkannya kala itu.

Janji dari Calo berbuah manis. Betul saja, Surti menjadi salah satu di antara 700 nama yang diumumkan sebagai penerima KIP Kuliah pada 2022. Uang sejumlah Rp6,6 juta pun masuk ke rekening milik Surti. Rp2,4 juta ia pakai membayar UKT. Sedangkan sisanya, Rp4,2 juta, sesuai kesepakatan, Surti membaginya dengan calo, yang ia anggap sebagai, “ucapan terima kasih.”

Belakangan, ia baru sadar, uang KIP Kuliah yang sisa Rp2,1 juta karena dipotong calo tak cukup untuk biaya hidup selama satu semester. Surti mesti memutar otak, bagaimana menghasilkan pundi rupiah untuk menutupi keperluan hidupnya.

“Jadi untuk tutupi itu, kerja ka juga sebagai joki tugas,” bebarnya.

Saat ditanya tentang identitas senior dan calo yang meloloskannya, Surti hanya mengangkat bahu, dan lebih sering mengunci mulut rapat-rapat.

Surti bukan satu-satunya orang yang ditawarkan calo untuk KIP Kuliah. Tejo (bukan nama sebenarnya), mahasiswa angkatan 2021 mengaku pernah ditawarkan.

Berbeda dengan Surti, calo yang membantu Tejo lulus KIP Kuliah memiliki syarat yang terbilang ringan. Calo itu hanya meminta uang sekali, sebesar Rp2,5 juta di awal penerimaan Beasiswa.

“Dua juta setengah, satu kali ji, setelah itu saya semua ji yang ambil di semester berikutnya,” ungkap Tejo, Senin (14/8/2023).

Di sisi lain, salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), M Nur Fathun Naim Syaiful menolak tawaran seorang calo untuk membantunya jadi penerima beasiswa.

“Itu waktu, ada kaki tangan calo hubungika untuk dibantu, tapi ada syaratnya,” ungkapnya pada Washilah, Kamis (28/9/2023).

Saat itu, satu panggilan tak beralamat masuk ke ponsel milik Naim. Ia mengangkatnya, “halo dek, ada ini slot kosong untuk KIP. Lagi cari ka orang, tapi nanti harus ko transferkan ka Rp2,5 juta kalau cairmi itu KIP mu,” ucap Naim, menirukan sang calo.

Naim tak tahu siapa yang meneleponnya hari itu. Orang itu mengaku sebagai seniornya di FDK, yang bermaksud akan



Ilustrasi: Washilah - Ismail HM

meluluskan Naim dengan syarat mendapatkan komisi KIP Kuliah sebesar Rp2,5 juta di tiap semester. Menurut Naim, kesepakatan itu terlalu menguntungkan sang calo, sedang dirinya hanya mendapatkan ampas. Dengan tegas, Naim menolak tawaran itu.

Pada November 2022, penguaman penerima KIP Kuliah pun datang. Harapan Naim harus pupus, tak ada nama M Nur Fathun Naim Syaiful di sana.

Sumber lain yang ditemui Washilah, Abraham (bukan nama sebenarnya) mengungkap calo tersebut merupakan seorang pejabat kampus. Namun ia enggan membeberkan siapa yang dimaksud.

"Keluargaku *ji*, dari orang tua *ji* juga ku tahu ini kalau ada calo," bebarnya, Senin (18/9/2023).

Secara ekonomi, keluarga Abraham terbilang mapan dan berada. Namun, kesempatan mendapatkan Beasiswa KIP Kuliah melalui jalur keluarga tetap ia libas.

"Karena itu orang dalam dia punya porsi tersendiri, misalnya satu calo itu pegang 10 orang," ungapnya.

Saat Washilah mengonfir-

masi hal itu pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof Muhammad Halifah Mustamin tentang adanya calo di program KIP Kuliah, ia mengaku tak tahu apa-apa. Ia beralasan baru dilantik pada Agustus 2023 lalu.

"Saya baru dilantik (sebagai wakil rektor) Agustus 2023 lalu, jadi saya belum tahu (detil) soal itu," katanya, Selasa (19/9/2023).

Lebih lanjut, Washilah meminta penjelasan bagaimana sistem KIP Kuliah selama ini kepada Prof Halifah, namun tanggapan yang kami terima tetap sama, ia menyarankan untuk menanyakan hal itu kepada Baharuddin, selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan.

Saat dikonfirmasi, Baharuddin membantah terkait adanya permainan calo KIP Kuliah.

Ia mengatakan, UIN Alauddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program KIP Kuliah, telah melakukan proses seleksi sesuai petunjuk teknis yang telah diatur.

"Kita tidak boleh keluar dari petunjuk teknis itu, dan kita memang skala prioritasnya memang yang punya KIP dan berprestasi," jelasnya, Rabu (20/9/2023).

Baharuddin menjelaskan, dalam proses seleksi, pihaknya memprioritaskan calon penerima yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki salah satu dari KIP/KKS/KJP. Apabila kuota belum terpenuhi, maka kuota dapat diambil dari mahasiswa baru yang tidak memiliki kartu. Namun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. Pertimbangan seleksi calon penerima, kata Baharuddin dilakukan dengan memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non akademik calon penerima.

Melalui mekanisme seleksi yang ia jelaskan, Baharuddin dengan tegas membantah adanya calo dalam proses seleksi calon penerima KIP Kuliah.

"Kalau itu yang dikatakan (calo), itu sudah tidak benar, walaupun ada seperti itu, saya pribadi umpamanya yang punya keluarga dan mau urus KIP, dan dia sesuai standar dan kriteria, itu kita akan bantu," ungapnya.

"Yang seperti itu *kan* layak untuk dibantu, dan menurut saya itu logis," lanjutnya.

Senada dengan itu, mantan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof Darussalam juga membantah terkait dugaan adanya permainan calo dalam penentuan penerima KIP Kuliah. Menurutnya, kabar itu sukar untuk disebut ada, sebab dalam prosedur pelaksanaan, pihaknya telah menyelesaikan sesuai pedoman dan dengan pengawasan yang ketat.

"Saya katakan, unsur yang dikatakan terkait KIP calo itu susah untuk disebutkan ada, karena sudah melalui prosedur, di mana calo itu akan ada?" ujarnya kepada Washilah, Senin (28/8/2023).

#### Pelaksanaan KIP Kuliah Perlu Dievaluasi

KIP Kuliah sejatinya untuk memberi akses luas tiap warga negara mengakses pendidikan tinggi. Tujuannya sebagaimana UUD 1945 alinea keempat, "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Namun dalam prakteknya, usaha negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tak jarang dimutilasi oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Satria

Unggul Wicaksana menyadari dalam pelaksanaan KIP Kuliah banyak penyalahgunaan atau pungutan liar yang bertentangan dan jauh dari prinsip dasar pelaksanaan KIP Kuliah.

"Mulai dari joki KIP Kuliah, kemudian kuota dari KIP Kuliah untuk parpol dan pungutan-pungutan liar yang cenderung menuju praktek koruptif," ucapnya pada Washilah lewat pesan suara *Whatsapp*, Minggu (24/9/2023).

Menurutnya, perguruan tinggi mesti mengembalikan prinsip atau mekanisme pengelolaan KIP Kuliah secara transparan dan akuntabel. Benar-benar dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang tidak mampu.

"Sehingga hak-hak dari mahasiswa di UIN Alauddin, secara dasar itu lebih baik ke depan," tegasnya.

\*Penulis: Rahmat Rizki/  
Sriwahyuni

\*Editor: Irham Syahril

Pimpinan & Sivitas Akademik  
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Mengucapkan

**58<sup>th</sup>**  
**DIES NATALIS**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
"Bersinergi Majukan Kampus  
Berenergi Jayakan Bangsa"

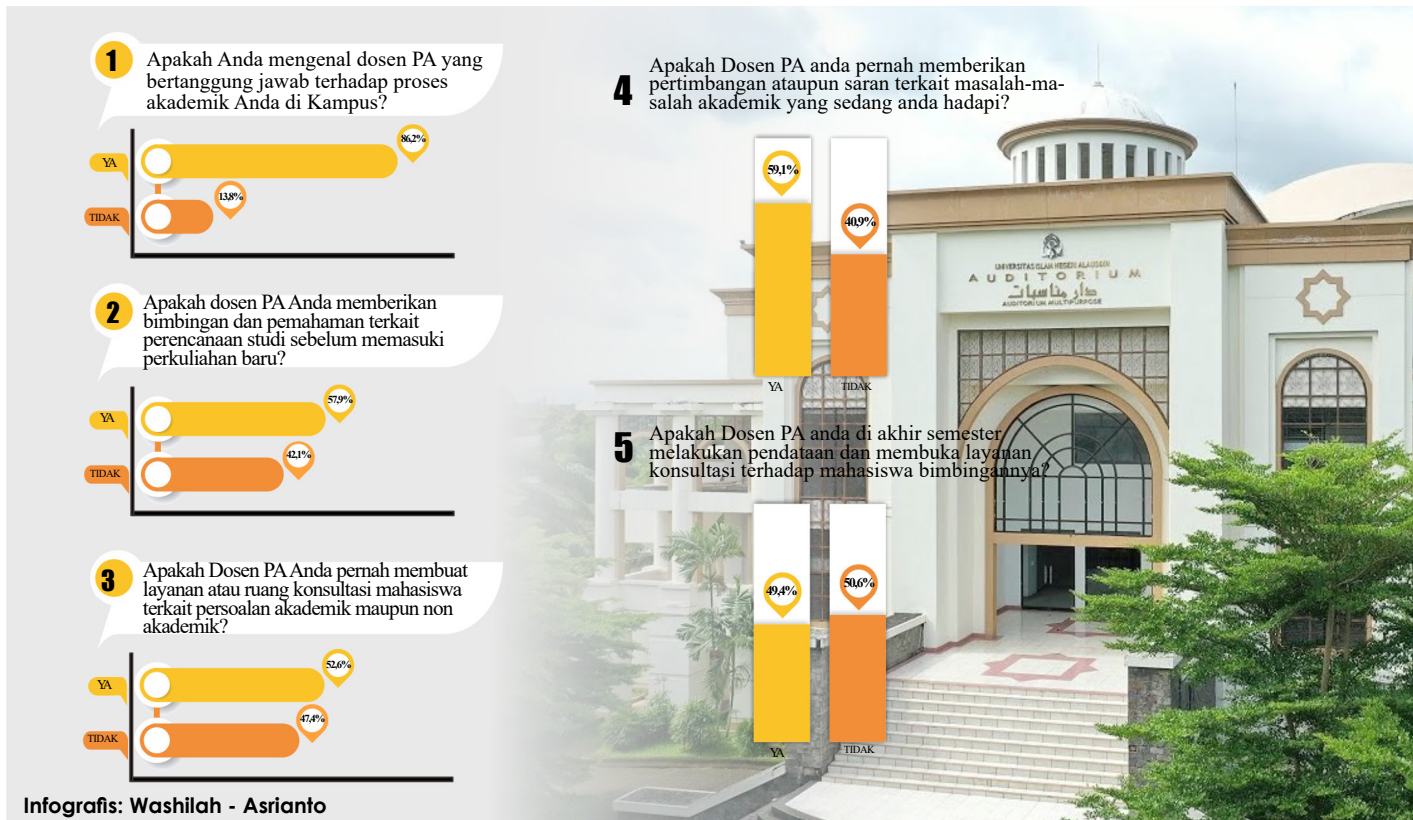
Ar Fahmyddin A'raf Tauhid M.Arch., Ph.D  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Pimpinan & Sivitas Akademik  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar

Mengucapkan

**58<sup>th</sup>**  
**Selamat Dies Natalis Ke-58 Tahun**  
**UIN Alauddin Makassar**  
"Bersinergi Majukan Kampus, Berenergi Jayakan Bangsa"

Dr. H. Barsihannor, M. Ag.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora



Riset ini bertujuan menakar kinerja dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk melihat bagaimana interaksi mahasiswa dan dosen PA terkait hubungan akademik mahasiswa di kampus. Pengumpulan pendapat melalui metode pembagian kuesioner yang dilakukan Litbang Washilah pada 11 Januari hingga 23 Januari 2022. Dengan menggunakan *simple random sampling* untuk menentukan responden yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kami memilih 247 responden yang tersebar di delapan fakultas dengan *margin of error* 5%. Litbang Washilah memilih untuk menampilkan hasil kuisisioner yang dianggap penting untuk diketahui sivitas akademika UIN Alauddin Makassar.

## Dosen PA: Antara Pendampingan atau Sekadar Tanda Tangan KRS

**Washilah - Kehadiran Dosen Penasehat Akademik (PA) di UIN Alauddin Makassar dinilai belum maksimal. Beberapa dari mereka hanya bertugas saat penandatanganan Kartu Rencana Studi (KRS). Lalu, bagaimana seharusnya Dosen PA membimbing mahasiswanya?**

Menurut salah satu Dosen PA, Farid Fajrin, penasihat akademik punya tugas memberi informasi dan nasihat (*advice*) yang berkaitan dengan kendala-kendala mahasiswa.

Kalau kata Arjun, dosen PA diberikan tugas oleh program studi (*prodi*) untuk mengarahkan atau membimbing mahasiswa dalam semua kegiatan akademik.

“Misalnya konsultasi akademik. Ini untuk mencapai atau meningkatkan prestasi mahasiswa,” kata Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) itu.

Penjelasan Arjun maupun Farid Fajrin soal dosen PA tidak beda jauh dari versi Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar. Di buku itu disebut, tugas dan fungsi Dosen PA yaitu memberikan nasehat dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingan guna membantu kelancaran studinya.

### Disfungsi Dosen PA

Dosen PA memiliki peran penting dalam proses akademik

dan non-akademik mahasiswa di kampus. Pada 2022 lalu, Litbang Washilah mencoba menakar kinerja dosen PA di Kampus Peradaban. Dari 247 responden, hampir 50 persen mengakui tidak ada pembimbingan terkait perencanaan studi sebelum memasuki perkuliahan semester baru. Artinya, cukup banyak dosen PA yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Mirisnya, dari keseluruhan responden, ada lebih dari 30 persen mahasiswa yang bahkan mengaku tidak mengenal dosen pembimbing akademiknya.

Dosen PA seharusnya melakukan komunikasi dan interaksi secara intensif dengan mahasiswa. Sehingga fungsi dan perannya untuk memaksimalkan bimbingan kepada mahasiswa dapat berjalan baik. Akan tetapi, ini tidak dapat dicapai kalau pertemuan antara dosen PA dan mahasiswa bimbingannya jarang dilakukan.

Persoalan ini pun dikeluhkan Muhammad Achsan Maulana. Mahasiswa FEBI itu menyebut kalau hingga saat ini peran dan fungsi dosen PA belum masif dirasakannya.

“Palingan kita hanya datang saat penandatanganan KRS saja,” ungkap mahasiswa Akuntansi tersebut.

Achsan juga mengatakan kalau dosen PA terbilang sukar ditemui. “Kalau saya sendiri belum pernah konsultasi hal-hal lain selain dari penandatanganan KRS, karena kebetulan dosen PA saya agak sibuk orangnya jadi sulit untuk

ditemui,” jelasnya.

Meskipun, tidak semua Dosen PA sukar ditemui. Arjun yang sejurusan dengan Achsan justru mengaku kalau pembimbingannya berjalan dengan baik. Apalagi Dosen PA-nya adalah kajurnya sendiri.

“Jadi tidak adaji batasan kalau konsultasi harus di hari apa, yang penting saat jam kerja. Bahkan biasa dosen PA yang hubungi mahasiswa jika diketahui ada masalah,” bebernya.

Berbeda cerita di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP), Sriwahyuni juga mengaku sulit menemui dosen PA-nya. Ia menghitung hanya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan dosen PA.

“Saya sih jarang (ketemu). Setahuku dia Prof, jadi sibuk sekali,” kata Mahasiswa Ilmu Hadits itu.

Sebenarnya, kata dia, ada grup *WhatsApp* yang dibuat dengan dosen PA namun tidak ada interaksi.

“Setiap kita bertanya jarang sekali merespon, padahal dia yang suruh *buatkan* grupnya,” ucapnya.

Memang sejak awal, Sriwahyuni mengaku, tidak pernah ada pengenalan soal tugas dosen PA. Untuk konsultasi soal akademiknya, dia biasanya langsung bertanya ke ketua jurusan.

Mahasiswi yang mulai kuliah di UIN sejak 2019 itu hanya tahu kalau dosen PA itu tugasnya untuk tempat menyeter hafalan.

Salah satu tugas Dosen PA memang sebagai tempat menyeter

hafalan Al-quran juz 30—Syarat sebelum mahasiswa bisa mengikuti ujian proposal atau ujian hasil—Namun, ini hanya diterapkan di beberapa fakultas, misalnya FEBI dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di Fakultas Syariah dan Hukum, ada dosen yang secara khusus ditunjuk sebagai penguji dan tempat mahasiswa menyeter hafalan.

Tugas Dosen PA yang cenderung hanya sebagai penandatanganan KRS menurut Farid Fajrin karena dosen sendiri sudah punya kesibukan yang cukup banyak. Mulai dari tanggung jawab mengajar di kelas, jabatan struktural di fakultas, penelitian, hingga pengabdian. Hal ini membuat peran dosen sebagai penasihat akademik kadang tidak berjalan baik. Olehnya itu, Dosen PA di FEBI itu berharap mahasiswa mengambil peran.

“Kesibukan cukup banyak. Sehingga untuk mengurus yang sifatnya teknis sampai ke dalam itu *ndak bisami* dikontrol satu-satu. Kami memang harap mahasiswa yang ambil peran, minta saran. Karena pengontrolan satu persatu itu agak berat.”

### Bagaimana Seharusnya Pembimbingan Dosen PA dan Mahasiswa

Apa yang dialami Achsan dan Sriwahyuni tidak akan menimpa mahasiswa lain kalau komunikasi antara mahasiswa dan Dosen PA berjalan baik. Perlu ada sinergitas antara mahasiswa dan dosen PA. Ketika mahasiswa punya masalah, dikomunikasikan dengan dosen PA. Di satu sisi, dosen PA juga harus aktif dan responsif menanggapi persoalan mahasiswa.

Mahasiswa FEBI, Muhammad Achsan Maulana menganggap kalau dosen PA seharusnya men-

jadi orangtua kedua mahasiswa di kampus.

“Semisal punya masalah di kampus, dan masalah-masalah terkait perkuliahan maka dosen PA-lah yang turut andil untuk itu,” ucapnya.

Masalah lain, beberapa mahasiswa juga dinilai masih apatis dengan persoalan akademiknya. “Susah sekali diingatkan, saya coba pancing di grup, tidak ada respon,” kata Farid Fajrin.

Sejak menjadi dosen PA pada 2022, Farid Fajrin mengaku selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk menghubunginya kalau ada masalah. Termasuk konsultasi perkembangan akademik.

“Kalau saya pribadi sebagai dosen PA, saya minta mereka yang aktif untuk bertanya, konsultasi minta pendapat. Jangan sampai ketemu PA-nya sekali setiap semester untuk KRS atau setoran hafalan,” jelasnya.

Kalau ini dilakukan semua dosen pembimbing, peran dan fungsi dosen PA dapat dimaksimalkan. Agar tidak ada masalah dalam proses akademik mahasiswa, Farid bilang intinya adalah membangun komunikasi yang baik.

“Komunikasi dua arah. PA juga mau bertanya kemudian mahasiswa merespon,” ucapnya.

Selain itu, harus ada jadwal khusus untuk bertemu. “Pertemuan rutin ini untuk membangun kemistri,” kata Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Alauddin, Prof Khamaluddin Abunawas menegaskan setiap masalah yang dihadapi mahasiswa terkait proses akademik mestinya dikoordinasikan dengan Dosen PA.

“Bimbingan akademik itu semua masalah yang dihadapi. Mestinya dia (mahasiswa) datang setiap kali ada masalah. Dosen PA-lah yang memberikan solusi. Intinya komunikasi penting.”

### Lantas apa yang terjadi Kalau Dosen PA tidak melakukan kerjanya?

Sejauh ini, memang belum ada penekanan langsung dari pimpinan fakultas maupun universitas. Pun tidak ada teguran kepada dosen yang tidak melaksanakan tugas pembimbingannya dengan baik.

“Tidak ada, karena ketika kami sudah di SK-kan berarti itu sudah tersirat bahwa ini tanggung jawab kami untuk memberikan nasihat sebaik mungkin. Teknisnya dikembalikan kepada dosen PA masing-masing. Tetapi kalau penekanan secara langsung sejauh ini belum ada,” ujar Farid.

Di beberapa pertemuan antar dosen, misalnya rapat edukasi, Farid bilang soal pembimbingan akademik memang sudah sering disinggung. Akan tetapi, hanya berupa himbauan.

“Tidak sampai ditekankan bagaimana. Hanya berupa himbauan seperti mahasiswa yang sudah lama namun belum lulus-lulus,” katanya.

\*Penulis: Heny Mustari/  
Bulqis Lathifah Wahab  
Editor: Nabila Rayhan

# Ada dan Tiada Tes Wawancara, Penentuan UKT Tetap Rancu

**Washilah** – Agustus 2023 lalu, Ketua Sema U Herianto Arbi dan Dema U Jumardi, UIN Alauddin Makassar, berinisiatif menjumpai Wakil Rektor Bidang Akademik periode 2019-2023, Prof Mardan. Tujuannya untuk menunjukkan penemuan mereka, dimana dalam riset yang mereka lakukan, sebanyak 50,8% dari 354 Mahasiswa Baru (Maba) yang menjadi responden riset tersebut mengaku Uang Kuliah Tunggal (UKT)-nya tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga mereka. 19,5% sangat tidak sesuai, selebihnya merasa sesuai.

Realita ini menurut Herianto melenceng dan tidak sejalan dengan peraturan yang ada, khususnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 82 Tahun 2023. Dimana dalam salah satu keputusan, yakni diktum kelima berbunyi; “UKT PTKIN sebagaimana dalam diktum satu, terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”.

Tingginya angka ketidakpuasan dan ketidaktepatan penentuan UKT Maba diyakini Ketua Sema U, terjadi karena ketiadaan proses wawancara. Proses wawancara, kata Herianto terakhir kali berlaku pada angkatan 2019. Covid-19 adalah alasannya, wajar saja, saat itu sedang gencar-gencarnya *lockdown* dan menghindari kontak, akibatnya angkatan 2020 sampai sekarang, tidak melalui proses wawancara dalam penentuan UKT. Sehingga, yang menjadi landasan kampus dalam menentukan UKT mahasiswa adalah dengan melalui berkas yang diseter saat masih berstatus calon Maba. Formatnya beragam, slip pembayaran listrik bulan terakhir, foto rumah dan penghasilan orang tua adalah beberapa pelengkap berkas yang wajib dicantumkan di sana.

Padahal, berkas semacam itu cukup mudah diakali, termasuk bagi Malik (bukan nama sebenarnya). Malik merupakan mahasiswa semester 5, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF). Malik dapat UKT golongan 2 dengan nominal Rp900 ribu. Nominal itu tergolong rendah bagi keluarga Malik yang memiliki bisnis ternak ayam kampung.

“Kalo bapak biasanya dapat 16-jutaan perbulan dari (ternak) ayamnya,” kata Malik.

Malik mengaku, 2021 lalu saat menyeret berkasnya, ia memasukkan beberapa data palsu. Foto rumah yang dia masukkan adalah milik tetangganya, Malik tahu betul jika rumahnya dapat membuat UKT-nya selangit. Untuk penghasilan orangtua, mudah saja, Malik tinggal mengurus di kantor desanya. Dia menyuruh agar nominal yang dimasukkan adalah Rp500 ribu perbulan. Begitu juga berkas Malik yang lain, akalnya ada-ada saja. Pengetahuan ini ia peroleh dari kakak sepupunya.

“Toh *nda adaji* juga yang mau wawancara dan orang tua apalagi didatangi rumah,” ujar Malik menirukan perkataan sepupunya kala itu.

## Penentuan Salah Arah, Mahasiswa Jadi Merana

Apa yang dialami Malik tidak seindah yang dibayangkan. Beberapa kasus justru mendapatkan UKT ugul-ugalan di saat mereka menyodorkan berkas yang tidak diakali sama-sekali. Muh Zulkifli salah satunya.

“Semua berkas (kategorisasi yang ia sodorkan) itu menyatakan ke arah miskin, (tapi) tetap *tonji* tinggi UKT (ku),” pungkas pria asal pulau Lae-Lae itu.

Pria dengan sapaan akrab Baba itu mengenang perkara UKT yang membuatnya tak jadi merasakan dunia perkuliahan 2020 lalu. Walau dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Mandiri (UMM) kala itu, Baba harus pontang-panting cari uang demi penuh biaya UKT yang ditanggung UIN Alauddin Makassar padanya.

Kini, Baba sudah semester lima. Jika saja dia bisa bayar UKT 2020 kemarin, dia harusnya sudah beranjak semester tujuh. Melalui pesan suara *WhatsApp*, Baba menceritakan perjuangannya sebagai calon mahasiswa baru yang menggebu lantas pupus menjadi abu.

“Kayaknya terlalu besar ini UKT-mu, belum lagi adek-adekmu yang masih sekolah, belum adekmu yang masuk pesantren, belum nanti uang makan di rumah bagaimana, belum nanti uang jajanmu bagaimana, uang bulananmu bagaimana kalau sudah masuk kampus,” ucap Baba menirukan ayahnya ketika tahu anak sulungnya itu mendapat golongan tujuh dalam kategorisasi UKT.

Bagi Baba yang lulus di Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), besaran yang harus dibayar sejumlah Rp2,5 juta.

Bagi Ayah Baba yang mata pencariannya sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu, nominal uang tersebut sangat besar. Terlebih lagi, ayah Baba selaku tulang punggung tunggal, harus menghidupi 6 orang anggota keluarganya. Ditambah, kelima adik Baba sedang bersekolah. Biaya yang mereka butuhkan beragam. Sehingga, ketika di antara mereka ada yang meminta uang untuk sebuah keperluan, Ayah Baba hanya memberikan uang pada anaknya yang dinilai lebih harus diutamakan.

“Tapi kalau bersamaan *Ki* butuh diprioritaskan yang paling butuh kayak saya dulu baru Rafi (adik Baba),” katanya.

Memahami kondisi keluarganya, Baba putar otak cari uang sendiri. Pada tahun 2020 lalu, ia mulai bekerja serabutan sebagai buruh. Kebetulan Baba berdomisili di pulau Lae-Lae, tempat yang cukup padat dengan kapal angkutan barang. Hal itu Baba manfaatkan untuk cari pundi-pundi rupiah.

Sebagai buruh angkutan barang, Baba bertugas mengangkat barang-barang para penumpang kapal yang ingin berpindah dari tempat tinggalnya ke pulau lainnya ataupun sebaliknya. Penghasilan Baba tidak menentu.

“Kadang Rp5 ribu, Rp10 ribu, ada *tong* (yang) baik-baik kayak Rp50 ribu”.

“Kadang *ka* juga pergi mancing, hasil pancingku sedikit, jadi (tinggal jadikan) lauk *mami*”.

Setelah berhasil mengumpulkan uang pembayaran UKT dari hasil keringatnya serta pinjaman dari rekannya, Baba kembali dibuat kelimpungan. Baba berpikir sudah bisa bernafas lega, sayangnya tidak, uang yang dikumpulkan Baba ternyata sia-sia setelah tau dirinya terlambat beberapa menit membayar UKT. Dia membawa uangnya setelah portal dinyatakan tutup untuk Maba UMM kala itu dan tidak dapat diproses oleh Bank yang bersangkutan.

Saat tahu dirinya terancam gagal berkuliah, Baba berusaha mencari solusi dan meminta bantuan pada kenalan-kelannya yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Ia menemui Mustakim waktu itu, dia adalah senior Baba yang merupakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK). Usai mendengar cerita Baba, Mustakim segera mengajak Baba menemui Dekan FTK untuk menceritakan yang dialami oleh Baba.

“Adakah jalan lain ini pak, karena ini adekku terlambat beberapa menit bayar UKT, Terus dinyatakan terlambat,” ucap Baba menirukan Mustakim kala itu.

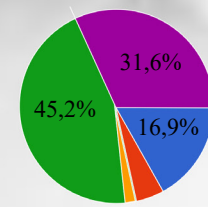
Sayangnya, respon Dekan FTK saat itu tidak seperti yang diharapkan Baba dan Mustakim. Dengan tenang sang Dekan menerangkan pada Baba; Sistem portal tidak bisa diganggu, walau telat berapa menitpun itu, sekali telat tetap telat. Dekan FTK itu meraih selebaran yang ada di atas mejanya lantas menunjukkannya pada Baba dan Mustakim. Dia malah menyarankan Baba untuk berkuliah di kampus lain yang masih membuka pendaftaran.

Baba merayu, dia membalas ucapan sang Dekan dengan penuh harap. Ia kekeh tidak ingin kuliah di kampus lain selain UIN Alauddin Makassar. Sayangnya, Dekan itu tak bisa mengambil langkah apapun.

Nahasnya, Baba gugur sebagai Maba 2020 di Kampus Peradaban.

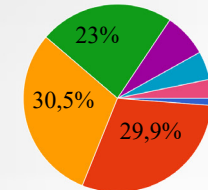
Walau gagal berkuliah 2020 lalu, Baba kembali mencoba peruntungan di tahun 2021. Ia

Apa pekerjaan orang tua anda?



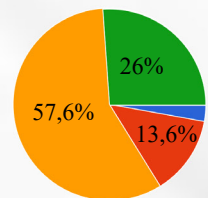
- Pegawai Negeri Sipil
- Pegawai Swasta
- Pengusaha
- Petani/Nelayan
- Lainnya

Kategori berapa UKT anda?



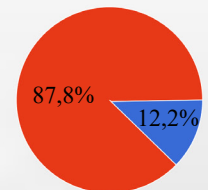
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Apakah anda merasa UKT yang didapatkan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga anda?



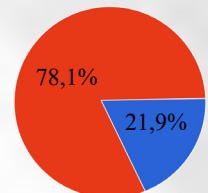
- Sangat sesuai
- Sesuai
- Tidak sesuai
- Sangat tidak sesuai

Apakah anda melalui proses wawancara dalam penentuan UKT?



- Ya
- Tidak

Apakah anda tahu keberadaan rekategorisasi UKT?



- Ya
- Tidak

Infografis: Washilah - Ismail HM

Riset ini bertujuan menakar ketepatan penentuan UKT Mahasiswa Baru (Maba) 2023 untuk melihat seberapa banyak mahasiswa yang merasa tidak puas dengan besaran UKT yang didapatkannya. Pengumpulan pendapat melalui metode pembagian kuesioner yang dilakukan Litbang Washilah pada 19 September hingga 28 Oktober 2023. Dengan menggunakan *simple random sampling* untuk menentukan responden yang merupakan Maba 2023 UIN Alauddin Makassar, kami memilih 361 responden yang tersebar di delapan fakultas dengan *margin of error* 5%. Litbang Washilah memilih untuk menampilkan hasil kuisisioner yang dianggap penting untuk diketahui sivitas akademika UIN Alauddin Makassar.

kembali dinyatakan lulus sebagai Camaba UIN Alauddin Makassar. Kali ini, pilihannya jatuh pada jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Kabar baiknya, Baba mendapatkan kategorisasi tiga. Kabar buruknya, golongan tiga di jurusannya sebesar Rp2,3 juta. Hampir mendekati jumlah yang tak mampu dibayar Baba di tahun sebelumnya.

Kali ini, Baba menyelesaikan pembayaran UKT sebagai syarat

diterimanya sebagai Maba UIN Alauddin Makassar. Beberapa waktu berlalu, Baba menjalani kehidupan kampusnya seperti mahasiswa pada umumnya. Dia bergaul dengan semestinya. Berkawan, menimbah ilmu di kelas, berorganisasi dan kesibukan lain yang bisa dijumpai di kampus.

Selama berkuliah, Baba tinggal bersama temannya. Rahmat, dia adalah kawan seperguruan Baba saat masih berstatus sebagai

santri. Biaya kos sepenuhnya ditanggung Rahmat. Baba hanya tinggal sepele. Saat tak punya kesibukan kuliah, Baba lebih memilih untuk pulang ke kampungnya.

Saat libur semester, Baba disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Hobinya gonta-ganti pekerjaan, kalo dirasa kurang menghasilkan, Baba mencoba pekerjaan lainnya. Salah satunya dengan menjadi buruh. Dia pernah terlibat dalam pembangunan gedung besar di daerah Barombong. Di tempat itu, Baba lah yang paling muda. Selama tiga bulan bekerja, normalnya Baba harus tiba di lokasi pembangunan dari jam enam pagi, lalu pulang jam lima sore. Hanya saja, Baba memilih untuk lebih banyak lembur dan memilih untuk pulang jam sepuluh malam demi mendulang rupiah lebih ban-

yak. Dengan lembur, Baba bisa mendapatkan Rp150 ribu perhari yang jika bekerja dengan jam normal tenaganya hanya dihargai Rp85 ribu perhari.

“Hampirka juga kecelakaan kerja kemarin, hampirka jatuh dari lantai atas hampirka mati,” ucapnya.

Menjadi buruh jelas tidak mudah bagi Baba, namun dia tidak boleh pilih-pilih cara menghasilkan uang. Walau begitu, ketakutan Baba saat menjadi buruh, membulatkan tekadnya untuk berhenti. Baba menyerah bekerja setelah menerima gajinya di bulan ketiga.

#### Tes Wawancara Ada, Keluhan juga Ada

Masalah yang Baba alami hanya sedikit contoh dari upaya mahasiswa memenuhi UKT yang

ditanggihkan kepada mereka, Walaupun UKT yang dilayangkan tersebut menasar secara sepihak. Bagaimana tidak, proses paling sakral dalam penentuan UKT, yakni proses wawancara sudah tidak berlaku secara formal sejak 2020 lalu. Walau demikian, pihak kampus membantah terkait ketiadaan proses wawancara yang dimaksud.

Wakil Rektor Bidang Akademik periode 2023-2027, Kamaluddin Abu Nawas lah yang membantah hal tersebut. Ia mengaku proses wawancara masih digaungkan di UIN Alauddin Makassar. Hanya saja kata dia, pelaksanaan proses wawancara tidak berada pada tataran universitas, melainkan pada tataran jurusan. Hal tersebut dilakukan lantaran dinilai lebih praktis, sebab jurusan dirasa lebih paham persoalan mahasiswa mereka

sendiri.

“Jadi itu (proses wawancara penentuan UKT) sudah jalan sebenarnya, tentu berbeda ketika hanya memperkirakan, oh ini saja langsung kasih yang sudah melakukan verifikasi dengan bentuk wawancara langsung atau via telepon. Artinya apa, sudah ada usaha untuk lebih mendekati kebenaran dengan mahasiswa yang sesungguhnya,” begitu pengakuan Abu Nawas, Selasa (05/09/2023).

Hanya saja, setelah melakukan riset terkait proses wawancara kepada mahasiswa baru angkatan 2023 UIN Alauddin Makassar, hasilnya jelas membantah dengan tegas pernyataan Abu Nawas yang sempat dilayangkan. 87,6 persen dari 509 responden mengaku tidak melalui wawancara dalam proses penentuan UKT mereka. Tidak hanya itu,

50,1 persen dari mereka bahkan merasa tidak puas dengan besaran UKT yang mereka tanggung.

Upaya Dema U dan Sema U untuk audiensi dengan pimpinan kampus terdahulu, pada Agustus 2023 lalu juga tidak membuahkan hasil. Pihak Sema U dijanjikan hasil temuan mereka akan dibawa ke agenda Rapat Pimpinan (Rapim). Namun hingga pergantian pejabat birokrasi kampus saat ini, hilal pengadaan proses wawancara dalam penentuan UKT belum nampak.

“Kami harap proses wawancara dalam penentuan UKT (mahasiswa) diadakan lagi pihak kampus agar penentuan biaya UKT tepat sasaran,” kata Herianto Arbi.

**Penulis: Saldi Adrian/  
Malebbi Salsabila  
Editor: Rahmat Rizki**



Suasana wawancara UKT-BKT Jalur UMM Mahasiswa Baru dan beberapa orang tua di gedung Auditorium UIN Alauddin Makassar. Kamis (16/8/2018) | Foto: Washilah-Arsip.



Keluarga Kecil  
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  
Lembaga Informasi Mahasiswa Alauddin (LIMA)  
*Mengucapkan*

**Selamat Dies Natalis Ke-58  
UIN Alauddin Makassar**

# Tak Cukup Uang, Jalan Kaki hingga FYP

**Washilah** – Apa yang kau lakukan jika harus berjalan kaki sejauh 10 kilo meter? Jaraknya seperti tujuh kali perjalanan dari bundaran Samata menuju Kampus II UIN Alauddin, bahkan lebih. Apakah kau akan merengek meminta bantuan kawanmu? Jika itu Yusran, dia hanya mengandalkan kedua kakinya.

Kala mentari telah redup di langit Samata, seorang mahasiswa bernama Yusran berjalan kaki sejauh 10 kilometer melintasi gelap dan panjangnya jalan. Ia berjalan kaki selama tiga jam dari kampus II UIN Alauddin hingga sampai di tempat tinggalnya yang berada di Kecamatan Tamalate, Makassar.

Hari itu, Jumat (6/10/2023), setelah menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, ditambah juga dengan pelatihan yang ia ikuti di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), membuat Yusran harus pulang saat gelap perlahan menyergap.

Saban itu, kumandang adzan Magrib sahat-sahut melangit, tatkala Yusran telah usai dengan segala aktivitas kuliah dan organisasinya. Ia pun melipir ke arah Masjid Agung UIN Alauddin. Setelah mendirikan salat, ia berjalan keluar. Di ambang pintu, Yusran mematung beberapa saat, tangannya melengkok masuk meraba saku celananya. Dua kantong pada bagian depan dan belakang ia raba dengan hikmat. Nahasnya, semua kosong, tak ada sepeser rupiah di sana. Tak putus asa, ransel yang ia bopong tak luput diinterogasi. Di sana, ia mendapati dua lembar uang kertas, satu berwarna ungu, satu berwarna coklat keabu-abuan. Hanya tersisa Rp15ribu. Sedangkan

sewa jasa ojek online seharga Rp25 ribu. Yusran melangkah dari ambang pintu masjid. Ia kemudian duduk, menenangkan kepala dan mengenakan sepatunya.

Yusran tak memiliki kendaraan pribadi, seperti motor atau bahkan sepeda. Selama berkuliah di UIN Alauddin pada Agustus lalu, Yusran hanya mengandalkan tumpangan dari seorang teman, kerabat atau jasa ojek online sebagai pilihan terakhirnya, sebab untuk sekali pergi menuju kampus, ia harus mengeluarkan uang tidak kurang dari Rp20 ribu. Jumlah itu terbilang besar bagi Yusran, namun ia tak punya pilihan lain, apalagi dengan tempat tinggal.

“Uang dari orang tua kurang, bapak saya hanya petani, keperluan lainnya juga banyak, jadi saya sekarang bergantung pada kakak-kakak saya”

**Yusran**  
Mahasiswa PMI

Sebelumnya, pada 2022 lalu, setelah tamat di bangku SMA, Yusran meninggalkan kampung halamannya untuk mencari peruntungan di tanah Bugis. Ia sempat bekerja sebagai petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di salah satu Pertamina yang ada di Kabu-

paten Barru. Hampir satu tahun ia bekerja di sana.

Hal itu ia lakukan demi hidup mandiri dan juga mempersiapkan biaya perkuliahannya kelak di 2023. Sejak melepas seragam SMA pada 2022 lalu, Yusran memang telah memantapkan niatnya untuk berkuliah. Namun, waktu itu ia belum punya ongkos untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Akhirnya, ia harus berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiah terlebih dahulu.

Kemudian, pada pertengahan 2023, saat kebanyakan perguruan tinggi dengan serempak membuka pendaftaran kuliah, Yusran pun telah siap perihal uang masuk kuliah yang telah ia kumpulkan selama bekerja sebagai petugas SPBU.

Waktu itu, UIN Alauddin jadi pilihan pertamanya. Alasannya memilih kampus peradaban sebagai tempat menimba ilmu pun terbilang unik.

“Saya memilih UIN sebagai tempat kuliah karena mengajarkan nilai agama. Kebetulan di kampung saya sangat awam dengan nilai-nilai agama. Jadi saya ingin belajar di sini, kuliah baik-baik. Saya ingin mengubah cara berpikir di kampung saya,” harapnya.

Alhasil, ia pun diterima sebagai mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK).

Sejak berkuliah, anak bungsu dari 13 bersaudara itu telah diarahkan oleh salah satu kakaknya untuk tinggal di Pondok Pesantren Media Dakwah Sunnah Makassar yang berlokasi di jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate. Alasannya sederhana, di sana ia tak perlu mengeluarkan biaya *living cost*. Namun, masalah berikutnya bagi Yusran adalah jarak antara Pondok Dakwah dan kampus terbilang jauh. Itu pula yang membuat Yusran memutuskan berjalan kaki malam itu.

Di sisi lain, Yusran juga enggan meminta bantuan kawannya. “Nanti memganggu kenyamanan teman saya. Apalagi baru sudah selesai kuliah dan berkegiatan, pasti capek. *Nda* enak, takut merepotkan,” ucap pria kelahiran Buton Tengah itu.

Yusran pun memulai perjalanan dari kampus II UIN Alauddin menuju Pondok Dakwah dengan beban berupa tas yang memuat buku-buku kuliahnya. Langit gelap tak sekalipun menghalangi langkahnya. Ia berjalan ditemani pemandangan kendaraan yang lalu-lalang dengan sorot lampu yang tak sekalipun berkedip.

Setelah hampir 10 menit berjalan kaki, Yusran sampai di simpang empat, Bundaran Samata. Ia kemudian belok ke arah kiri menuju jalan Musatafa Daeng Bunga. Walau berjalan di bahu jalan, Yusran selalu

awas dengan kendaraan yang lewat di dekatnya. Sesekali ia akan berhenti, membiarkan mobil truk atau pemotor ugal-ugalan melesat lebih dulu. Lalu ia akan kembali melangkah.

Sebelum melewati jembatan kecil yang membatasi Kelurahan Romang Polong dengan Paccinongan, Yusran mengarahkan pandangannya pada tempat pencucian motor yang berada tepat di samping kirinya. Di sana ia melihat beberapa motor yang sedang dibersihkan. Saat itu, pikirannya pun melayang, ia membayangkan dirinya memiliki motor pribadi, yang akan ia cuci di tempat itu.

“Kalau ada motorku, satu kali akan kucuci di situ,” ungkapnya.

Pikirannya terbang, membayangkan apa saja yang belum ia capai. Bukan hanya tentang kendaraan pribadi, ia juga membayangkan tentang masa depan yang akan menjadi seperti apa nantinya. Itu masih jadi misteri baginya, namun Yusran tak sekalipun menyerah dengan keadaan. Langkahnya terus ke depan.

“Tetap jalan, capek boleh, menyerah jangan”

**Yusran**  
Mahasiswa PMI

Di tengah perjalanan, ponsel yang sedari tadi digenggamnya tetiba berdering. Satu panggilan video dari kakak dan ibunya masuk. Seketika setelah menjawab panggilan itu, ia lalu dihadapkan pada pertanyaan sederhana.

“Kamu di mana, dan mau ke mana?” ujarinya menirukan pertanyaan dari kakaknya.

“Saya mau pulang, dan saya berjalan kaki,” jawabnya.

Mendengar itu, kakak dan ibunya tercengang. Mereka hanya bisa menyemangati Yusran.

“Mereka bilang kamu sabar-sabar dulu, nanti kita kirimkan uang,” tutur pria kelahiran 2004 itu.

Usai panggilan video berakhir, adzan Isya pun berkumandang. Yusran menepi ke Masjid Jami Nurul Muhsinin, Kelurahan Paccinongan. Ia menanggalkan sepatunya lalu pergi menuju tempat wudhu. Ia pun melakukan salat. Selepas melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim, ia tak lupa melantarkan doa agar ia dan keluarganya selalu diberi kesehatan. Satu lagi, ia juga berharap untuk “punya motor sendiri”.

Setelah melaksanakan salat, ia kembali melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Saat itu, Yusran telah melewati jalan Mustafa Daeng Bunga dan jalan Abd. Muthalib. Ia tiba tak jauh dari Tugu Patung Massa. Di simpang tiga itu, Yusran belok ke arah kanan, menuju jalan Kacong Daeng Lalang.

Sudah lebih dari satu jam ia

menebas jarak. Tenggorokannya pun jadi kering. Bermodalkan uang yang tersisa di ranselnya, Yusran menepi ke salah satu kedai es teh untuk sekadar melepas dahaga.

Kendaraan masih ramai saat itu. Yusran kembali berjalan. Derap langkah menemaninya melintasi jalan Syekh Yusuf menuju jalan Sultan Alauddin. Ia berjalan lurus menyeberangi simpang empat yang dipenuhi kendaraan, menuju jalan Mallengeri Raya. Yusran telah berjalan meninggalkan Kabupaten Gowa, kini ia berada di Makassar. Sedikit lagi untuk sampai. Hampir tiga jam berjalan, ia pun tiba di Daeng Tata. Akhirnya, pada pukul 9 malam, Yusran sampai di Pondok Pesantren Media Dakwah Sunnah Makassar.

“Alhamdulillah,” katanya.

**Dari Konten Tik-Tok, Rezeki Datang**

Di sela-sela perjalanan pulang malam itu, Yusran mengabadikan beberapa moment dalam perjalanannya. Ada 24 jepretan bercerita yang dipilih dan ia unggah ke Tik-Tok. Malam itu juga, konten itu ia posting lewat akun pribadinya, @ysrn2004.

Tak disangka, video yang ia unggah menuai banyak simpati. Ada yang memberikan semangat lewat komentar di postingannya, ada pula yang menawarkan tumpangan padanya. Beberapa lainnya, melalui chat pribadi.

“Bang sini mki kuantarki, kebetulan Maxim ka, jangan mki bayar,” tulis akun bernama @tyaaa, di postingan milik Yusran.

“Saya rute Samata-Dg Tata tiap hari, info saja lewat Tik-Tok kalau mau nebeng. Biasanya saya pulang kerja habis magrib,” tulis @Ade Yusha.

Bahkan, ada juga yang memberikan sepeda.

“Ada sepedaku nda dipake, siapa tau mau pake sepeda, lumayan daripada harus jalan,” komentar salah satu akun Tik-Tok bernama @Nuel.

Bukan hanya sepeda, ia juga diberikan uang hingga motor.

“Setelah FYP (*For Your Page*) Tik-Tok, ada yang kasi uang, sepeda, dan juga motor,” pungkas Yusran kepada Washilah.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Yusran menolak tumbang, walau patah, dan walau kondisinya tak selalu seirama dengan harapannya. Di akhir cerita, ia juga berpesan untuk tidak menyalahkan waktu dalam belajar.

“Buat teman-teman mahasiswa tetap semangat jangan mengeluh saya nda ada kendaraan tapi tetap semangat apalagi kalian yang punya kendaraan, harus semangat,” pesannya.

\*Penulis: **Nadhilla Putri Hasir (Magang)**  
\*Editor: **Rahmat Rizki**



Mahasiswa PMI, Yusran | Foto: Washilah - Asrianto.

# Pemecah “Telur” Guru Besar FKIK

**Washilah** - “Setelah bertahun-tahun usaha dan kerja keras, menjadi Profesor adalah capaian yang tidak bisa saya deskripsikan dengan kata-kata”.

Di usia 42 tahun, Nur Hidayah berhasil meraih gelar Guru Besar pertama di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.

“Perempuan Pemecah Telur,” sebab ‘pecah telur’ bukan hanya pada gelar Guru Besar di FKIK, melainkan sebelumnya pada 2013 silam, perempuan kelahiran Ujung Pandang itu juga jadi orang pertama yang meraih gelar Doktor di Fakultas Ilmu Kesehatan saat itu.

Gelar tersebut diraih bukan dengan jalan yang mudah, tetapi penuh dedikasi dan kerja keras.

Sebelum meraih gelar Doktor hingga Guru Besar pertama FKIK, Nur Hidayah memulai jenjang pendidikan tingkat lanjutnya di Akademi Keperawatan (Akper) Dinas kesehatan (Dekpes) Bantabantaeng Makassar. Ia mengambil jurusan Keperawatan dan lulus sebagai Diploma Tiga pada 2001. Kemudian ia melanjutkan Sarjana Keperawatannya di Universitas Hasanuddin (Unhas) dan lulus pada 2004. Lalu pada 2005, ia juga mendapatkan gelar Profesi Nersnya di kampus yang sama.

Pada tahun itu pula, Nur Hidayah telah menjadi dosen pengajar di Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Lalu pada 2006, ia diangkat menjadi Sekertaris di Jurusan Keperawatan. Sembari mengemban amanah sebagai Sekertaris Jurusan, Nur Hidayah terus melanjutkan karir pendidikannya. Pada 2007, ia berhasil meraih gelar Magister pada bidang Administrasi RS di Unhas.

Setelah masa jabatannya sebagai Sekertaris Jurusan berakhir pada 2009, ia kemudian diangkat menjadi Ketua Jurusan. Pada tahap ini, Nur Hidayah telah memantapkan niatnya untuk mengikuti ujian masuk S3, namun harapan itu sempat kandas, sebab kala itu ia sedang dalam kondisi hamil.

Ibu empat anak itu tak lantas memupuskan niatnya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Pada tahun 2013 silam, ia

berhasil menyabet gelar Doktor pertama di Fakultas Ilmu Kesehatan. Selang dua tahun, pada 2015, ia kemudian diangkat sebagai Wakil Dekan (Wadek I) Bidang Akademik FKIK UIN Alauddin Makassar.

Tak ada perjuangan yang instan untuk sampai pada tahap itu, banyak tantangan yang harus ia lalui, apalagi dengan gelar Professor. Waktu itu, pada tahun 2017, kala ia menjabat sebagai Wakil Dekan I, ia sudah merencanakan untuk mengajukan gelar Guru Besar.

“Walaupun pada saat itu saya sudah menjadi Wakil Dekan I, saya juga mencoba untuk mengajukan jurnal scopus, tetapi ada beberapa hambatan, salah satunya perlu akreditasi kampus,” ujarnya.

Dalam meraih gelar Guru Besar, ia harus memenuhi beberapa persyaratan seperti *injection scopus*—untuk menulis *jurnal scopus* dan syarat dimana kampus harus berakreditasi A. Untuk memenuhi persyaratan itu, tidaklah mudah. Dalam menjadikan kampus berakreditasi A, ia ikut terlibat menjadi tim inti. Hal tersebut membuat langkahnya sempat terhenti untuk mencalonkan diri sebagai Guru Besar.

Setelah kampus terakreditasi A pada Desember 2018 lalu, dan jabatan Wakil Dekan I yang diamanahkan padanya telah usai di tahun 2019, ia megaku memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada pengajuan gelar Professor. Akan tetapi, persyaratan menjadi Guru Besar ikut bertambah. Tak hanya *jurnal scopus*, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi untuk pengajuan Professor.

Persyaratan khusus yang dibutuhkan yaitu, pernah menjadi promotor dan kopromotor, pernah menguji dan membimbing mahasiswa dengan jumlah paling sedikit 50 frekuensi, serta pernah mendapat hibah dengan nominal Rp100 juta.

Pada saat itu, Nur Hidayah belum memenuhi syarat. Namun,

dengan tekad yang kuat, ia terus mencoba.

“Saya mulai mencoba mengajukan hibah-hibah, meskipun beberapa diantaranya nominalnya kecil sekitar Rp30-an juta,” ungkapnya.

“Pada tahun 2019, saya berhasil mendapatkan hibah dari Austria, yang membantu dalam proses ini,” lanjutnya.

Alhasil, pengajuan untuk menjadi Guru Besar pun lebih lapang terbuka. Namun, tantangan berikutnya lagi, yaitu proses review jurnal, ia beberapa kali harus melakukan tahapan revisi dan perbaikan bahkan empat hingga lima kali.

“Saya harus mengatasi beberapa tantangan dalam *review* artikel dan memastikan semuanya relevan. Saya juga berfokus pada penulisan jurnal yang memiliki tingkat indeks Q1,” ucapnya.

Pada akhirnya, usaha Nur Hidayah berbuah manis. Artikel yang ia tulis pun diterima dan diakui sebagai salah satu syarat utama dalam proses mendapatkan gelar profesor.

Selain bergelut dalam dunia pendidikan formal, Nur Hidayah juga banyak mengikuti pelatihan tingkat nasional, di antaranya yaitu, Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) yang diselenggarakan oleh UPSDM Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Kemudian

ia juga mengikuti “Pelatihan Pengisian Borang Akreditasi Sarjana Keperawatan dan Perijinan *Online Program profesiners*” yang diadakan AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) Jakarta, pada 2010 silam. Di tahun yang sama juga, ia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, untuk “Pengembangan Soal Ujian Tulis Perawat”.

Tidak hanya pelatihan nasional, Nur Hidayah juga beberapa kali mengikuti pelatihan tingkat Internasional. Seperti “*Peace Education Concepts and Approaches (PECA)*”, yang diselenggarakan oleh Mindanao Peacebuilding

Institute Philippines, pada tahun 2010 silam. Kemudian *The International Dialogue Centre KAICIID*, di Wina Austria pada 2016. Lalu *International Interfaith Initiative*, di India pada 2017. Tak hanya itu, ia juga pernah mengikuti pelatihan di Korea Selatan, Taiwan dan beberapa lainnya lagi.

Rupanya, gelar yang saat ini ia emban telah lama ia tanamkan dalam benaknya. Nama beserta titel yang kini tercantum pernah ia tulis di secarik kertas saat masa kanak-kanaknya.

“Saya punya kepercayaan yang kuat bahwa saya memilih jalan ini itu tidak mudah, saya pasti punya cara dimana saya bisa memenuhi semua syarat-syarat itu. Kalau kita mau menginspirasi orang, harusnya tanya bagaimana dia bisa seperti itu, jangan ditanya kok bisa ya. Setiap kita mencapai di satu titik itu pasti punya perjalanan sendiri, perjalanan ini mungkin yang orang lain tidak tau,” tutupnya.

\*Penulis: Nadhila Putri Hasir (Magang)  
\*Editor: Rahmat Rizki



Prof Nur Hidayah | Foto: Istimewa.

## Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah., S.Kep., Ns., M.Kes

1. Diploma Tiga/AMD.Kep | 2001 | Keperawatan | Akper Depkes Bantabantaeng Makassar
2. S1/S.Kep | 2004 | Keperawatan | Unhas
3. Profesi Ners/NS | 2005 | Keperawatan | Unhas
4. S2/M.Kes | 2007 | Administrasi | RS Unhas
5. S3/Dr. | 2013 | Administrasi | Publik UNM

## Pendirian FK Tengah Digodok Kampus, Dekan FKIK: Kami Optimis

**Washilah** – UIN Alauddin Makassar tengah menggodok proses pemisahan Fakultas Kedokteran (FK) dengan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), yang saat ini tergabung dalam Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK).

Keinginan itu diungkapkan langsung Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis, ia memerintahkan Dekan baru FKIK menyiapkan berkas pemisahan fakultas itu.

“(Bu Dekan FKIK) agar menyiapkan pemisahan FKIK, karena Kalau FK berdiri FIK juga berdiri, maka ini jalan,” ujarnya dalam acara sertijab Dekan dan Wadep FKIK beberapa waktu lalu.

Dekan FKIK, dr Dewi Setiawati menyambut baik wacana tersebut, meski menurutnya pendirian FK memang bukan perkara gampang. Namun ia optimis dengan kerja keras tim akan menjadi solusi dalam pembentukan Fakultas baru.

“Mungkin kerjanya berat tapi dengan doa dan kerja keras serta dukungan Bapak/Ibu (sivitas akademika FKIK) ini akan terlaksana,” katanya di kegiatan yang sama.

Sementara itu, Wakil Dekan I bidang Akademik FKIK, Isriany Ismail yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya wacana

pendirian itu, namun dirinya belum mengetahui sejauh mana progres wacana pendirian tersebut.

“Untuk pemisahannya memang saya dengar, tapi terkait sejauh mana prosesnya itu saya belum tahu karena saya juga baru tiga minggu menjabat,” ucapnya kepada Washilah, Rabu (11/10/2023).

Washilah berusaha mengonfirmasi terkait progres pendirian FK itu kepada Dekan FKIK, dr Dewi Setiawati pada Senin (16/10/2023) melalui surat namun belum direspon hingga Kamis (19/10/2023) pukul 12.46.

Salah satu mahasiswa Pendidikan Kedokteran, Muhammad Fitrah Asshobri mengatakan dirinya sangat setuju dengan wacana pendirian FK itu, menurutnya hal itu telah lama diperbincangkan di kalangan mahasiswa.

“Semoga cepat didirikan, kalau soal ramai dibicarakan itu sudah lama sebelum dekan baru,” tuturnya kepada Washilah, Rabu (18/10/2023).

Sementara itu, Ketua Jurusan Pendidikan Kedokteran dr Rini Fitriani yang dihubungi Washilah melalui WhatsApp pada Rabu (18/10/2023) pukul 15.59 belum merespon hingga Kamis (19/10/2023) pukul 12.53.

\*Penulis: Dinda Lestari  
(magang)

\*Editor: Irham Syahril



Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar, Dr Andi Aderus. | Foto: Istimewa.

## Warek II Optimis Pendirian FK Terwujud: Itu Menguntungkan Bagi Kampus

**Washilah** – Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), dr Dewi Setiawati tengah menyiapkan berkas pemisahan Fakultas Kedokteran (FK) dengan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) yang saat ini tergabung dalam Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK).

Dewi mengatakan pendirian FK memang bukan perkara gampang. Namun ia optimis dengan kerja keras tim akan menjadi solusi dalam pembentukan Fakultas baru.

“Mungkin kerjanya berat tapi dengan doa dan kerja keras serta dukungan Bapak/Ibu (sivitas akademika FKIK) ini akan terlaksana,” katanya dalam acara sertijab Dekan dan Wadep FKIK beberapa waktu lalu.

Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin, Dr Andi Aderus menanggapi wacana penggodokan tersebut. Ia mengatakan pemisahan itu dilaku-

kan untuk memberi peluang kepada pejabat di FIK untuk berkarir hingga menjadi dekan.

“Sebab yang harus menjadi dekan pada FKIK itu harus dokter. Karena ijazah dokter tidak boleh ditandatangani yang bukan profesi dokter. Nah itu sebabnya, dekan di FKIK itu harus dokter,” ujarnya pada Washilah, Rabu (25/10/2023).

Ia mengungkapkan pemisahan FK dan FIK sudah disetujui pimpinan universitas dan sementara dalam proses pengurusan berkas pendiriannya. Menurutnya pemisahan itu tidak serta merta dilakukan namun, harus berproses sampai ke pusat.

“Pemisahan itu tidak serta merta di sini harus diproses sampai ke Jakarta sehingga itu disampaikan Rektor agar Dekan (FKIK) ini mengurus pemisahannya,” tuturnya.

Mantan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin itu juga yakin pemisahan FK dan FIK segera mungkin terealisasi, sebab menurutnya pemisahan ini menguntungkan bagi tataran universi-

tas.

“Saya yakin 99% akan terealisasi, karena itukan juga menguntungkan bagi kita. BLU itu bertambah karena bertambah mahasiswanya. Kita tahu fakultas kedokteran beda dengan fakultas lain. Fakultas kedokteran itu 12 juta (UKTnya) perorang minimalnya,” ucapnya.

Salah satu alumni FKIK, dr Ahmad Fari mengatakan penggodokan terhadap FK tentu penuh pertimbangan dari jajaran Rektor dan Dekan. Menurutnya, penggodokan itu akan mempermudah mahasiswa yang ada di FK dalam mengurus berkas akademik.

“Mahasiswa tidak perlu bolak balik dari kampus satu ke kampus dua. Saya rasa penggodokan FK ini sebagai wujud revitalisasi kedokteran UIN dalam mencapai visi misi almamater, dan fakultas serta mahasiswa kedokteran itu sendiri,” katanya.

\*Penulis: Nadhilla Putri  
Hasir (magang)

\*Editor: Nabila Rayhan



Rencana pendirian FK tengah digodok pihak universitas | Foto: Washilah - Irham Syahril

## Nasib Fisipol di Tengah Wacana Pendirian FK

**Washilah** – Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis berencana mendirikan Fakultas Kedokteran (FK). Wacana ini di sampainya saat menghadiri serah terima jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) beberapa waktu lalu.

“(Bu Dekan FKIK) agar menyiapkan pemisahan FKIK, karena Kalau FK berdiri FIK juga berdiri, maka ini jalan,”ujarnya.

Diketahui sebelumnya sudah ada wacana pendirian fakultas

baru yakni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) yang sudah diwacanakan sejak 2016 silam namun hingga saat ini belum menuai hasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) pendirian Fisipol, Syahrir Karim yang ditemui Washilah menjamin bahwa penggodokan Fisipol tidak akan terganggu dengan wacana pendirian FK.

Syahrir mengatakan pendirian Fisipol sudah mendapat rekomendasi dari Senat Universitas, Ia juga mengatakan pihaknya terus menyiapkan berkas pendirian yang akan di ajukan ke kementerian.

Meski prosesnya, kata Syahrir masih ada kendala seperti status Ilmu Politik dan Sosiologi Agama masih dalam naungan Kementerian Agama—status pendirian fakultas baru jurusan harus dibawah naungan kementerian pendidikan. Meski begitu pihaknya masih optimis akan pendirian Fisipol.

“Tapi kami tidak tinggal diam, kami akan segera mengadakan pertemuan (dengan Pansus lain) membahas kendala yang dihadapi dan menindaklanjuti instruksi Rektor,” katanya kepada Washilah, Senin (2/10/2023).

Menurut Syahrir, Prof Hamdan sebagai Rektor telah memberikan isyarat “lampu hijau” untuk pendirian Fisipol ini di periode keduan-ya.

Washilah berusaha mengonfirmasi itu ke Prof Hamdan pada Senin (2/10/2023) namun dirinya belum bisa di temui.

Sementara itu, Ketua HMJ Ilmu Politik Fathurrahman mengatakan Fisipol adalah sebuah identitas yang melekat terhadap jurusan sosial terutama ilmu politik. Menurutnya Fisipol adalah rumah dari jurusan sosial.

“Bagaimana fokus dari sebuah

jurusan itu memberikan ciri khas,” katanya.

Ketua HMJ Sosiologi Agama, Arfan menganggap pendirian Fisipol adalah kabar gembira dari pihak kampus. Ia berharap adanya Fisipol bisa membuka ruang baru. “Mudah mudahan adanya fakultas fisipol mampu memberikan ruang bagi mahasiswa sosial politik,” tuturnya.

\*Penulis: Hardiyanti  
(magang)

\*Editor: Irham Syahril

# Beban Kuliah Lapangan, Ditanggung Kampus atau Dompes Mahasiswa?

**Washilah** – Sudah tiga kali Fahri melakukan kuliah lapangan, tiga kali pula isi dompetnya harus terkuras. Tak ada tanggungan dari kampus, semuanya ditanggung pada dompetnya yang terbatas.

Sejak berkuliah sebagai Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (SPI), Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) pada 2020 lalu, Muhammad Fahri sudah tiga kali turun lapangan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliahnya. Praktek kuliah lapangan itu membutuhkan biaya. Mulai dari ongkos transportasi, makan, penginapan dan beberapa keperluan lainnya saat di lapangan. Jumlahnya pun bervariasi.

“Waktu ke Toraja, kemarin itu Rp500 ribu, ke Selayar Rp480 ribu, dan ke Sumpang Bitu itu Rp150 ribu,” beber mahasiswa kelahiran 2001 itu.

Biaya tersebut ditanggung kepada mahasiswa seperti Fahri, bukan dari negara atau tanggungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selalu ia bayar di tiap semesternya.

Bagi Fahri, jumlah itu terbilang berat untuk dirinya yang merupakan anak seorang petani. Sehingga ia harus bekerja mencari pundi rupiah dalam memenuhi biaya UKT, kuliah lapangan, dan kebutuhan kuliah lainnya.

“Tidak mauka bebani orangtuaku, makanya kerja ka” ungkapnya.

Dalam menutupi keperluan kuliahnya, anak sulung dari tiga bersaudara itu secara sukarela menawarkan diri bekerja di warung Bakso milik pamannya. Kebetulan, saat itu pamannya belum memiliki pegawai. Alhasil, ia pun direkrut menjadi pegawai pada awal 2020 lalu.

Tidak hanya bekerja, Fahri juga diberikan kamar untuk tinggal di sana. Rumah sekaligus warung milik pamannya itu berlokasi di Ruko Citra Garden, Kecamatan Sumba Opu, Gowa. Jaraknya terbilang dekat dengan Kampus II UIN Alauddin Makassar, hanya 10 menit menggunakan motor. Hal itu sangat menguntungkan bagi Fahri yang berasal dari Dusun Ujung Bulu, Gowa. Ia tak lagi pusing dengan ongkos bensin berlebih untuk perjalanan dari kampung ke kampus. Apalagi dengan biaya sewa kost di Samata.

Pada pertengahan 2021, saat pandemi mulai pulih dan kampus kembali menerapkan kuliah tatap muka, awalnya Fahri kelimpungan mengatur jadwal kuliah dan kerja. Ia harus ekstra membagi waktu. Meski begitu, Fahri tak sekalipun berputus asa dengan keadaan. Semua ia lakukan demi pendidikannya di kampus berju-

luk peradaban.

Bukan hanya kuliah tatap muka di ruang kelas, beberapa sistem perkuliahan pun sepenuhnya sudah diterapkan secara *offline*. Salah satunya, kuliah lapangan. Fahri dan teman seangkatannya jadi yang pertama melakukan kuliah lapangan setelah hampir dua tahun vakum akibat Covid.

Pada Oktober 2021 lalu, sayup-sayup agenda kuliah lapangan di Tana Toraja merayap di antara teman seangkatannya di jurusan SPI. Mulanya hanya sekadar “kabar burung,” sebab sebelumnya hal serupa hanya berakhir di telinga. Namun kali ini, agenda kuliah lapangan di Tana Toraja tak sakadar “kabar burung”.

Fahri dan teman seangkatannya kemudian dipanggil oleh dosen pengampu mata kuliah Praktek Penelitian Sumber Budaya—mata kuliah yang memerlukan praktek lapangan—untuk mendiskusikan persiapan sebelum melakukan kuliah lapangan. Di akhir diskusi, disepakati bahwa mahasiswa wajib menyetor uang sebesar Rp500 ribu untuk praktek lapangan pada Desember 2021, di Tana Toraja selama tiga hari. Bagi Fahri, jumlah itu terbilang tinggi.

“Sebenarnya membebani, apalagi dari keluarga kurang mampu,” keluh Fahri pada Washilah, Kamis (31/8/2023).

“Tapi takut juga karena dosen bilang mahasiswa yang tidak ikut akan beda nilainya,” lanjutnya.

Kendati demikian, Fahri lebih memilih ikut dalam praktek lapangan, sebab ia takut nilainya akan rusak. Dari hasil kerjanya di warung bakso milik pamannya, Fahri berhasil mengumpulkan ongkos yang diperlukan.

Perihal kuliah lapangan, tidak hanya sekali dilakukan oleh Fahri yang berkuliah di Jurusan SPI. Beberapa jurusan lain di UIN Alauddin juga melakukan praktek atau kuliah lapangan. Diantaranya ialah Studi Agama-Agama (SAA). Dengan kejadian yang hampir serupa, Fira dimintai biaya sebesar Rp550 ribu untuk kuliah lapangan selama tiga hari di Toraja.

Saat dimintai keterangan, Ketua Jurusan (Kajur) SAA periode 2019-2023, Sitti Syakirah Abu Nawas menjelaskan bahwa anggaran dari UKT digunakan jika KKL hanya di sekitar kota Makassar.

“Sesuai dengan pembiayaan yang diberikan yang disiapkan itu untuk destinasi daerah Makassar dan Gowa saja,” ucapnya, Senin

(28/8/2023). Ia juga mengatakan dana yang ia siapkan berupa upah pembimbing dan transportasi dalam kota.

Syakirah melanjutkan, prodi sudah melakukan pemotongan biaya KKL pada mahasiswa, sehingga mahasiswa cukup menyiapkan sebagian anggaran yang tidak masuk dalam *budget* yang disiapkan dari prodi.

“Jadi mahasiswa menyesuaikan dengan anggaran yang kami punya,” tuturnya.

## PMA Nomor 7 Tahun 2018

Dari dua jurusan yang disebut di atas, biaya praktek atau kuliah lapangan, semuanya dibebankan kepada mahasiswa. Namun, menurut Ketua Senat Mahasiswa (Sema) UIN Alauddin, Herianto Arbi menyebutkan bahwa seharusnya biaya tersebut tidak ditanggung kepada mahasiswa.

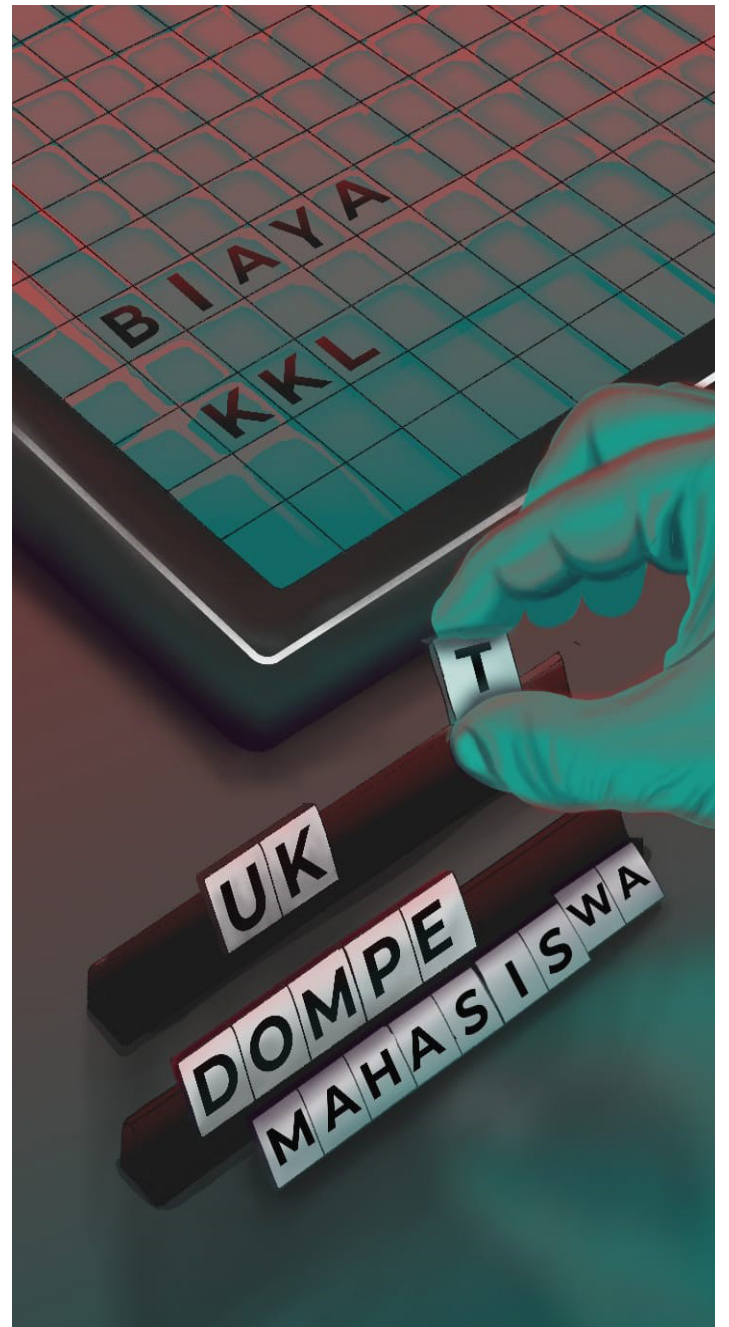
“Saya rasa sudah jelas kalau kuliah lapangan itu masuk kategori kegiatan yang dibiayai BOPTN (Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri), dan kalau kita pakai uang pribadi, berarti dipertanyakan anggaran untuk kegiatan itu kemana?” Begitu sebutnya.

Biaya BOPTN yang dimaksud Herianto merupakan biaya dari pemerintah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (SSBOPT). Pada pasal 1, ayat 4 dijelaskan bahwa, “BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri”.

Dari penjelasan PMA Nomor 7 tahun 2018, biaya kuliah lapangan memang sudah semestinya tidak ditanggung kepada mahasiswa. Seperti yang terjadi di Jurusan Biologi. Salah satu mahasiswanya, Bahrul melakukan praktikum lapangan *Taksonomi vetebrata* di Bulukumba selama tiga hari. Di awal, ia mengaku melakukan pembayaran sebesar Rp200 ribu.

“Kumpulki dulu uang, nanti dicarikan kembali setelah pulang kegiatan,” ungkapnya, Jum’at (1/9/2023).

Kata Bahrul, setelah kegiatan selesai, akan dibuat laporan per-



Ilustrasi: Washilah - Andi Muh Saleh

tanggungjawaban yang dikumpulkan ke penanggung jawab praktikum.

“Setelah itu menunggu satu bulan dan uang Rp200 ribu tadi dibagikan kembali ke mahasiswa,” lanjutnya.

Kajur biologi, Dr Masriani mengungkapkan pembiayaan praktikum lapangan diambil dari UKT mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi membiayai praktikum lapangan.

Di Jurusan Biologi, lanjutnya, anggaran praktikum tergabung antara biaya bahan praktikum di laboratorium jurusan dan praktikum lapangan.

“Jadi setiap semester diatur sedemikian rupa supaya bisa memenuhi kebutuhan semua praktikum selama satu semester ini,” tuturnya, Senin (4/9/2023).

Biaya praktikum lapangan yang ditanggung berupa dana transportasi, akomodasi, makanan, dan gaji praktikan.

“Kalau dosen tidak ada upah karena itu sudah tanggung jawab mereka sebagai dosen,” ungkapnya.

Hal yang dilakukan Jurusan

Biologi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6906 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Islam Negeri Tahun Anggaran 2021 pada Bab II yaitu Penggunaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) meliputi Praktikum/Kuliah.

Namun sayangnya, hal itu tidak sesuai dengan beberapa jurusan seperti yang dijelaskan di awal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor I, Prof Kamaluddin Abunawas, menegaskan biaya kuliah lapangan ditanggung dalam UKT dan tidak boleh lagi ada biaya dari mahasiswa.

“Kalau ada dampak biaya tambahan, seharusnya pihak fakultas atau prodi mengusulkan ke rektorat (Wakil Rektor II). Yang jelas yang namanya UKT tidak boleh ada penambahan biaya,” tegasnya,

\*Penulis: Hilda Nurfaidah/  
Rahmat Hidayat  
\*Editor: Rahmat Rizki

# Kapitalisasi Pendidikan dan Jalan Keluar untuk Kesejahteraan



Oleh: M. Ardan Hidayat

Pendidikan adalah wahana bagi proses perubahan terhadap peserta didik dengan jalan pengajaran dan pendidikan. Misalnya menurut bapak pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah bagaimana mengembangkan pertumbuhan jasmani dan rohani, selain itu ada juga yang memaknai pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia (Driyarkara). Sedangkan menurut Paulo Freire, pendidikan adalah wahana bagi proses pembebasan manusia. Pembebasan dalam artian pembebasan dari segala bentuk penindasan apapun nama dan alasannya. Pada dasarnya pendidikan adalah praktek pembebasan dan proses penyadaran. Peserta didik dibebaskan untuk memahami kontradiksi sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta dalam mengambil cara untuk melawan segala unsur yang menindas pada realitas tersebut.

Namun yang terjadi dalam dunia pendidikan kita hari ini telah membawa kita pada pembentukan manusia yang meminimalisir apresiasi dan kreatifitas manusia untuk berpikir dan menganalisis persoalan yang ada, akhirnya peserta didik hanya akan terjebak pada persoalan tugas kuliah dan dijauhkan dari permasalahan sosial. Hal tersebut bisa kita lihat dari peta jalan pendidikan (PJP) 2020-2035. Dalam PJP, pendidikan diproyeksikan menyambut bonus demografi, digitalisasi dan pasar tenaga kerja. Sedari awal, negara/kekuasaan telah terlanjur membawa bangsa ini ke rana persaingan tenaga kerja tingkat regional dan global. Sayangnya Indonesia di kanca perekonomian dunia tidak mampu untuk berperan besar dalam menjadi negara industri, sebaliknya Indonesia menjadi pencetak tenaga kerja upah murah yang dimotori melalui sistem pendidikan nasional yang tidak ilmiah, tidak demokratis apalagi yang berorientasi mengabdikan pada rakyat.

Membedah konsep pendidikan link in match, sebenarnya pola ini pertama kali di terapkan pada

masa orde baru, pada saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan yang diawali dengan masuknya modal asing, hal itu pula berpengaruh terhadap pendidikan

yang digunakan untuk mencetak robot industri. Pola link in match juga mempertegas hubungan antara industri, lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi, dan pemerintah yang menekankan bahwa pendidikan haruslah menyesuaikan diri

dengan lingkungan kerja (PENDIDIKAN-INDUSTRI-NEGARA). Mengkondisikan peserta didik untuk dapat lebih mudah diserap oleh industri dan menjadikan laboratorium perguruan tinggi sebagai pusat riset untuk memenuhi kepentingan pragmatis dunia industri dan pemerintah.

Pola ini kemudian menjadi titik masuk lebih luasnya dan langsung intervensi modal dalam tubuh institusi pendidikan terutama perguruan tinggi, kurikulum semakin dituntut memenuhi kebutuhan dunia industri dan riset lebih diarahkan untuk kepentingan industri terutama dalam hal produksi dan produk dari industri tersebut, sebagai kebutuhan yang disyaratkan oleh kondisi pasar bebas. Link in match menjadi pola pendidikan yang dianut oleh Indonesia sampai sekarang, itu bisa dirasakan lewat pemagangan yang langsung terintegrasi dengan dunia industri, dengan magang mahasiswa akan mendapatkan work experience (pengalaman kerja), namun bersamaan dengan itu sistem magang hanya mampu mencetak tenaga kerja upah murah siap pakai, tanpa sebelumnya membuat sebuah ekosistem industri yang dikuasai dan dikontrol oleh rakyat serta diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat.

Alih-alih untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berorientasi untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah/kekuasaan semakin memperkuat liberalisasi dan komersialisasinya dalam sektor pendidikan. Komersialisasi sektor pendidikan adalah skema yang digunakan untuk meraup keuntungan profit dari sektor pendidikan. Hal tersebut bersumber dari cengkraman neoliberalisme melalui World Trade Organization/WTO (organisasi perdagangan dunia), World Bank (bank dunia), IMF International Monetary Fund (dana moneter internasional) sebagai lembaga donor utang bagi Indonesia. Contoh kebijakan dalam dunia pendidikan yang merupakan turunan dari kebijakan neoliberalisme adalah UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 (pasal 12 ayat 2:b), "setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut", UU

Badan hukum pendidikan/BHP 2007, yaitu satu langkah menuju "swastanisasi" pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk BHP, termasuk di dalamnya sekolah negeri. (Pasal 54 ayat 2; masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana biaya pendidikan).

Miris bukan? Kebijakan-kebijakan pemerintah memang tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat. Mari kita menengok kebijakan penguasa pasca perubahan kultur masyarakat dan corak kapital akibat Covid-19 mendorong adanya deregulasi dalam sektor pendidikan sehingga membuat negara-negara yang ada mengubah peta jalan pendidikan untuk penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini terjadi juga di Indonesia dengan memunculkan konsep merdeka belajar dan kampus merdeka. Program tersebut dicanangkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kurikulum yang lahir tidak berdasarkan kebutuhan peserta didik ini tidak akan mencapai kemerdekaan belajarnya, selain itu kebijakan kampus merdeka merupakan metode Kemendikbud untuk mempercepat penciptaan tenaga kerja yang mempunyai skill yang tinggi, kemudian pada akhirnya output pendidikan tinggi hanya akan menjadi hamba industri dan akan menjadi komoditas di pasar tenaga kerja.

Sejalan dengan reformasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan merdeka belajar dalam bidang pendidikan tinggi adalah kampus merdeka. Salah satu kebijakan dalam kampus merdeka yang dilakukan adalah pembukaan program studi melalui kerjasama. Perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk peka dan cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi global, mampu memberikan terobosan dan inovasi, serta mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang handal dan siap untuk bersaing dalam dunia kerja baik secara global dan nasional. Pembukaan prodi baru ini hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi berakreditasi A dan B, kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas ranking qs, dan prodi tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan yang dibentuk oleh Mendikbud dalam perguruan tinggi belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga munculnya pola yang terputus antara industri dan perguruan tinggi. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa perubahan yang terjadi dalam sektor pendidikan hanyalah mekanisme pemenuhan kebutuhan industri melalui sektor pendidikan dengan pemenuhan tenaga kerja yang mempunyai skill tinggi, pernyataan tersebut diperkuat oleh syarat-syarat pembentukan prodi baru dalam

permenmendikbud nomor 7, thn 2020, pasal 36, ayat 2 tentang pembukaan program studi baru yang berusaha menjauhkan hakikat pendidikan pada sejatinya menuju pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri, sehingga peserta didik dijadikan sebagai calon buruh upah murah yang siap dipekerjakan di manapun demi nilai akademis tanpa ada upah yang layak baginya.

Cengkeraman sistem kapitalisme sudah demikian kuat dalam dunia pendidikan. Di akhir masa pemerintahan Soeharto telah menyediakan sebuah dasar untuk pemanfaatan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan segera pemilik modal, baik dalam persoalan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan produksi, ataupun bahkan menjadikan peserta didik sebagai pasar produk-produk baik yang berhubungan dengan kebutuhan aktivitas belajar mengajar ataupun yang tak ada hubungan sama sekali dengan dunia pendidikan.

Kebijakan neoliberal untuk pendidikan di Indonesia muncul dalam Otonomi Pendidikan yang di dalamnya terdapat Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah dan Otonomi Perguruan Tinggi Negeri, atau dikenal mahasiswa sebagai Otonomi Kampus. Seperti yang ditandatangani dalam Letter of Intentions (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF, pemerintah diharuskan untuk melepaskan semua program subsidi kebutuhan sosial masyarakat, termasuk pendidikan, dan memfokuskan penggunaan anggaran untuk pembayaran utang luar negeri. Pemerintah juga didikte untuk meliberalisasi pasar dalam negeri untuk investasi dan produk asing yang jelas, terutama dari negara-negara imperialis. Kedua faktor ini, pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dan liberalisasi (privatisasi) sektor-sektor produktif, adalah dasar adanya kebutuhan dari para kapitalis untuk mengontrol langsung fasilitas-fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan haruslah benar-benar menjadi alat kapital yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kapitalisme. Kebebasan belajar untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan adalah efisiensi yang harus disingkirkan, para peserta didik harus benar-benar dipersiapkan menjadi tenaga-tenaga kerja siap pakai dan patuh terhadap otoritas penguasa modal. Obyek-obyek penelitian di kampus yang tidak akan segera menghasilkan akumulasi modal harus ditinggalkan, digantikan dengan obyek-obyek penelitian yang menguntungkan kapitalisme.

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) sebagai organisasi gerakan kiri yang hari ini terus membicarakan dan menganalisis perkembangan dunia pendidikan Indonesia, melihat bahwa sistem pendidikan nasional kita tidak lebih menjadi alat sistem kapitalisme dalam melakukan reideologisasi

neolib-borjuis. Kampus berwujud lembaga pendidikan yang menjadi media sistem kapital dalam memperkokoh hegemoni dan akumulasi profit. Sebenarnya kita tidak pernah menolak sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri, itu sudah menjadi keniscayaan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (industrialisasi). Namun yang menjadi titik baliknya adalah seluruh industri ekstraktif dan smelter (Deindustrialisasi) di Indonesia adalah dikuasai oleh kekuatan kapital dari hulu sampai hilir. Sehingga kita menilai bahwa posisi relasi sektor pendidikan dengan dunia industri dan pasar tenaga kerja hari ini adalah hanya pada kepentingan neoliberal (sistem kapitalisme).

Bila pasar di Indonesia saat ini dikuasai oleh kapital, maka pendidikan Indonesia akan dikuasai pula oleh kekuatan kapital. Jadi pemerintah janganlah berharap banyak dari lulusan perguruan tinggi di negerinya mampu menyelesaikan persoalan bangsanya, karena mereka diarahkan untuk menyelesaikan dan menambal krisis kapitalisme. Mengikuti apa yang pernah dikatakan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukanlah mengejar gelar atau pun pekerjaan, akan tetapi menemukan jati diri yang benar-benar merdeka dan bermartabat. Sebetulnya, yang dibutuhkan adalah ilmu yang dapat disumbangkan kepada Bangsa Negara dan pengabdian. Solusi dan jalan keluar untuk kesejahteraan bersama dalam sektor pendidikan adalah;

- (1) Pendidikan Gratis, pembebasan biaya untuk semua jenjang pendidikan;
- (2) Ilmiah, pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan;
- (3) Demokratis, pendidikan gaya kolonialisme dan kapitalistik secepatnya ditinggalkan diganti iklim yang demokratis yaitu keyakinan yang mendalam dan hakiki akan adanya pengakuan hak-hak kewajiban yang proporsional. Di sini peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan ide dan gagasan serta demokratis dalam pengeluaran kebijakan sekolah maupun kampus;
- (4) Dan bervisi kerakyatan, Ahmadinejad pernah berkata, "saya bukanlah presiden akan tetapi pelayan rakyat", apalagi Negara kita adalah Negara demokrasi tentunya kepentingan rakyat yang dikedepankan. Sehingga pendidikan kita akan sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat yang mengarah terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi dan partisipatif secara budaya.

\*Penulis merupakan  
Mahasiswa Jurusan Sejarah  
Peradaban Islam Fakultas Adab  
dan Humaniora UIN Alauddin  
Makassar

## Aku, UKT dan Cinta

Penulis: Saldi Adrian

Suatu malam, aku duduk membeku di atas kasurku, melihat rupaku yang terpampang di cermin, memikirkankan akan jadi apa aku nanti.

Kini usiaku sembilan belas tahun. Untuk usia yang terbilang dewasa ini, kuliahku selama tiga semester masih ditanggung oleh Ayahku. Namun, saat ini dia hanyalah seorang pasien di rumah sakit setelah beberapa waktu lalu didiagnosa penyakit serius. Pada akhirnya, di sinilah aku, terdiam di kamar sembari putar otak cari solusi untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ini.

Aku akan beranjak semester empat, tenggat waktu pembayarannya tinggal delapan hari lagi. Jika tak kubayar, sampai sini saja pendidikanku. Ibuku tak mampu berbuat banyak. Untuk bayar biaya rumah sakit ayah saja dia harus pinjam uang pada kerabat kami. Belum lagi empat adikku yang juga harus dibiayai sekolahnya.

Tak ada solusi yang terpikir di benakku. Untuk bekerja serabutan, setidaknya butuh satu bulan untuk digaji. Gajinya-pun belum tentu mencukupi UKT ku yang besarnya Rp2,5 juta. Kelimpunganku tak berakhir di sini. Empat hari lalu, aku sempat mengajukan pemotongan UKT. Sebab, rasanya aku tak cukup pantas menerima UKT golongan tujuh padahal Ayahku hanya tukang ojek *online*. Baru kemarin malam kulihat pengumumannya, namaku tak ada di dalam list itu. Tadi siang, aku ngebet ingin ketemu ketua jurusanku, meminta penjelasannya dan solusi jika ada.

Kuceritakan semua yang kualami padanya tanpa tersisa sedikitpun—Ayahku yang merupakan tukang ojek online, Ayahku yang didiagnosa mengidap *tuberculosis* (TBC), Ayahku yang tak bisa apa-apa karena penyakit itu, aku yang jadi kesulitan bayar karena tulang punggung keluargaku sedang tidak baik-baik saja, hingga aku yang kecewa lantaran namaku tak ada dalam list penurunan kategorisasi UKT usai mengajukan berkas. Ketua jurusanku terdiam beberapa saat, wajahnya terlihat terpukul, dia berusaha mengucapakan sesuatu.

“Maaf ya Ara, jurusan tidak bisa ganggu keputusan SK (Surat Keputusan) yang sudah ada”

“Terlebih lagi, walaupun Ara dapat UKT tertinggi, kampus kita ini paling murah dibandingkan kampus manapun.”

Aku tertegun usai mendengar ucapannya. Mungkin juga sedikit marah bercampur kecewa. Kutinggalkan ruangan dengan mata yang sedikit perih. Mengingatnya saja membuatku ingin berteriak. Kini, aku masih berpikir keras cari penyelesaiannya. Berat pikiranku rasanya menyebar ke tubuhku. Ku robohkan tubuhku, kini aku terlentang di kasurku yang mungil. Saat mataku mulai menyipit ingin tidur, tiba-tiba saja ponselku berbunyi. Aku mendapatkan pesan *WhatsApp* oleh salah satu dosen ku.

“Assalamualaikum”

“Ara, kamu baik-baik saja kan?”

“Saya dapat cerita dari Ibu ketua jurusan...”

“Walaikumsalam pak, saya baik-baik saja kok pak hehe”

“Ara, jujur saja, mungkin saya bisa bantu”

“hmmm”

“Yasudah pak, lewat telepon saja bisa?”

“Bisa.”

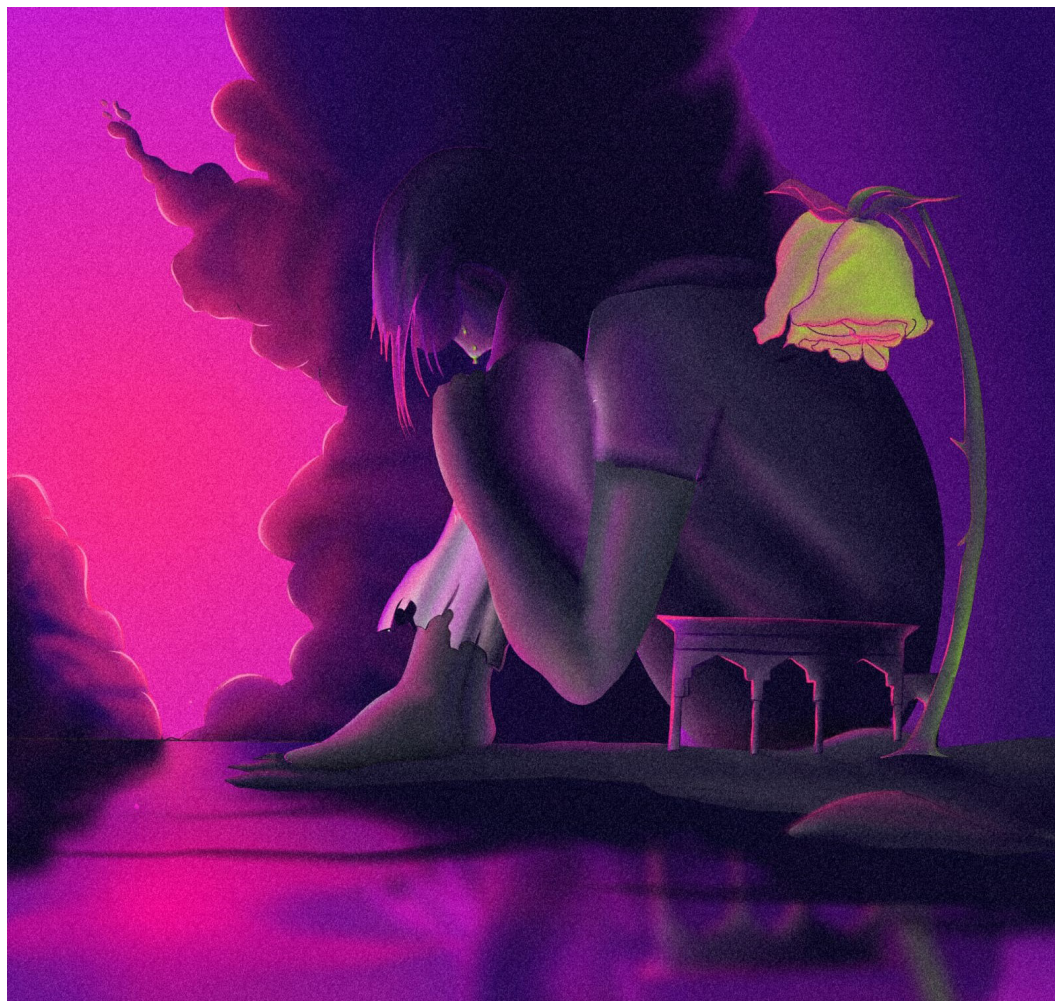
Aku menanggapi dengan baik. Sebab, dia adalah dosen yang cukup ramah bagiku. Mungkin saja karena usianya terbilang masih mudah, sehingga dia cukup nyambung dengan topik dan jokes ku. Kami bercerita via telepon selama empat puluh menit. Dia menyarankanku kerja di *cafe*kenalannya. Kata dia aku tak perlu pusing soal gaji. Aku akan dibayar lebih dulu walau belum gapap kerja sebulan. Walaupun gajinya hanya Rp1,6 juta, kurasa ini solusi yang cukup menjanjikan dibanding hanya terdiam berpikir seharian.

Hari ini hari pertamaku bekerja. Tugasku hanyalah membuat pesanan dan mengantarkannya. Untungnya, satunya-satunya rekan kerjaku adalah perempuan yang ramah, dia membantuku belajar menggunakan mesin kopi dan hal-hal lainnya menyangkut pekerjaanku. Walaupun hari ini hari pertama kerjaku, aku langsung diberi gaji. Tapi jujur saja, bekerja seharian ternyata sangat menguras energiku. Aku juga harus bawa bekal dan menahan hausku demi menekan pengeluaran.

Hari-hari berlalu, sudah tiga hari aku bekerja. Sudah mulai kurasakan ketidakcocokan di sini. Rekan kerjaku mendadak terang-terangan menunjukkan kejangkelannya padaku. Satu-satunya penyebab yang terpikirkan olehku, mungkin karena aku lebih dulu menerima gaji bahkan lebih tinggi darinya yang hanya Rp1,4 juta. Perlakuannya cukup melelahkanku, aku dibuat bekerja lebih banyak. Aku hanya bisa mengalah karena menghargainya.

Aku menelepon lalu menceritakan apa yang kualami pada pak Aris—dosen yang membantuku tempo hari. Kukatakan padanya ingin berhenti lantaran kurang nyaman. Pak Aris jawab tidak bisa. Alasannya sederhana, sebab aku sudah diberi gaji oleh bosku yang merupakan teman dari pak Aris. Aku tetap memaksanya. Meminta sejadi-jadinya. Pak Aris lalu menawarkanku jalan keluarnya. Pak Aris akan membayarkanku uang Rp1,6 juta yang kuterima pada bosku agar aku mau dilepaskan. Hanya saja, pak Aris meminta sesuatu. Dia akan menyampaikannya ketika kami sudah bertemu secara langsung.

Sekarang aku punya Rp1,6 juta untuk pembayaran UKT-ku. Sisanya akan kupenuhi dengan meminta pinjaman pada kenalanku. Sayangnya, ini tak semudah yang kubayangkan. Setelah kesana-kemari meminta pinjaman, tak satupun dari mereka mengulurkan tangannya padaku. Lagi-lagi aku hanya bisa terlentang di kasur



Ilustrasi: Washilah - Andi Muh Saleh

dipenuhi beban di kepalaku.

Hingga suatu pagi, aku bertemu dengan pak Aris di kampus. Dia mengajakku jalan sejenak berkeliling kota. Di dalam mobilnya, pak Aris bercerita banyak tentangnya, dirinya yang punya satu putra berusia dua tahun, dirinya yang terpaksa tetap bersama istrinya walaupun sudah tak punya rasa karena kasihan pada anaknya, dia yang ingin tetap menjadi ayah yang hebat untuk anaknya. Pak Aris tak ingin meniggalkan luka pada anaknya jika dirinya bercerai dengan sang istri. Kisahnya cukup menyayatku, pak Aris betul-betul keren dari kacamataku.

Pak Aris membawaku berkeliling cukup lama. Dari nge-Mall, nonton bioskop, makan berkali-kali. Sampai gelap-pun tak terasa olehku. Ternyata pagi sudah beranjak malam. Aku meminta dia antar pulang oleh pak Aris. Dalam perjalanan, kami mulai kehabisan topik. Hanya terdengar lagu “Still with you” oleh Jung Kook yang memecah keheningan.

“Ara, soal yang bapak bilang tadi malam...”

Pak Aris mulai menyinggungnya, pembahasan yang dia janjikan kemarin malam. Mobilnya melambat, dia memegang tanganku. Aku terkejut bukan main. Pak Aris lalu menatapku, Dia mencintaiku. Pak Aris mengaku mencintaiku. Dia menjelaskan alasannya dan sejak kapan itu terjadi. Aku terharu mendengarnya, jantungku berdegup kencang. Jika saja aku bisa melihat rupaku di cermin, mungkin sekarang warnanya akan kemerah. Aku masih terkejut dengan setiap jawabannya. Walau tahu dia sudah berkeluarga dan dia adalah dosenku. Aku tak menyangka cinta seindah ini. Aku

tak mengira ternyata rasa kagum ini sebetulnya adalah rasa cinta yang pertama kualami. Waktu terasa melambat. Pak Aris menatapku, matanya seakan berkata dia menginginkanku. Aku juga merasa begitu, lantas kuberikan ragaku padanya malam itu. Entah apa yang terjadi. Namun, rasanya bertingkah seolah tak kenal saat di lingkungan kampus, lalu bertingkah layaknya kekasih saat di luar. Sejak bersamanya, rasanya tubuhku tak seberat dulu, saat di mana aku bercermin memikirkan masa depanku. Hari terus berlalu, hubunganku dan pak Aris berjalan tanpa rintangan yang berarti.

Hingga satu waktu, ketika hubunganku sudah berjalan tiga bulan. Jadwal menstruasi ku berantakan. Aku belum haid dua bulan lamanya. Aku takut, sudah dua minggu takut ini kupendam sendiri. Aku lebih takut melihat respon pak Aris padaku jika dia tahu. Walau begitu, tetap ku beranikan diri bercerita padanya. Usai mendengarku, pak Aris menanggukanku dengan lembut. Dia meyakinkanku semua baik-baik saja. Pak Aris lantas membelikan-ku test pack lalu menyuruhku untuk mencobanya sendiri.

Keesokan harinya, aku mencoba alat yang diberikan pak Aris. Hasilnya biru. Aku hamil oleh pak Aris. Aku menangis sejadi-jadinya. Saat mulai tenang. Kukabari pak Aris melalui telepon. Saat mendengar ceritaku, dia segera menutup panggilannya.

Aku mulai frustrasi. Kutelpon dia berkali-kali. Tiba-tiba saja foto profil *WhatsApp*-nya menghilang, pesanku juga hanya centang satu. Dia memblokirku.

Laki-laki sialan. Aku engutuknya sejadi-jadinya. Jika do’aku akan dikabulkan oleh tuhan. Aku ingin tuhan segera mencabut nyawanya. Seharian itu, aku hanya menangis dan berteriak sebisaku. Satu minggu lamanya aku berdiam di rumah membolos kuliah. Aku ingin sembuh lebih dulu lalu kembali seperti hari-hari biasanya. Walau aku sadar, itu mungkin mustahil untuk diriku yang sedang hamil. Tiba-tiba saja aku mendapatkan panggilan *WhatsApp* oleh ibuku. Dia menangis, aku yang sedang kacau mulai menerka ada apa dengannya.

“Ayahmu meninggal Ra, cepat pulang.”

Mendengar ucapan ibuku itu, rasanya hidupku sudah berakhir. Aku sudah tak punya apa-apa. Kedua lelaki yang kucintai sudah meninggalkan dan melantarkanku. Kini aku sudah mencapai batasku. Aku sudah tidak sanggup. Aku menggapai sebuah gantung yang tergeletak di depan cermin. Menggenggamnya erat, lalu kutuskan pada perutku. Baju putihku memerah dengan cepat, terus mengalir membasahi lantai. Perlahan, rasa sakitku berubah tenang. Suara di sekitarku sedikit demi sedikit meredup. Mataku perlahan tertutup.

\*Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

## Kisah Pengusiran Penganut Tolotang di Sidrap



Tiga warga Enrekang mengunjungi Kuburan Nenek Songkok di Pemakaman Umum Desa Bonto, Enrekang, Selasa (04/07/2023) | Foto: Washilah - Heni Handayani.

**Washilah** - Siang itu, di beranda rumah panggung yang dkitari hamparan sawah menghijau, keluarga Mustakim sedang berkumpul. Mereka menyantap buras—lontong—dan laha—olahan ikan mentah segar—, makanan khas Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Di Sidrap, penganut Tolotang semakin menyusut jumlahnya. Mereka tersisih. Setelah negara memaksa agar mereka menganut agama Hindu.

Keluarga Mustakim, satu dari sekian keluarga penganut agama lokal Tolotang yang bertahan di Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Sidrap.

Adik ipar Mustakim, Irma mengisahkan keluarganya pernah mengalami pengusiran warga kampung saat hendak menjalankan ritual Sipulung.

Orang Tolotang mengenal Sipulung sebagai ritual memanjatkan doa dan memohon kepada leluhur agar sejahtera dan terlindungi dari marabahaya. Satu keluarga masyarakat Tolotang dari berbagai daerah perantauan berkumpul dalam satu tempat, tepatnya di kuburan nenek moyang.

Ritual Sipulung merupakan bentuk penghormatan kepada



Batu Nisan Kuburan Nenek Songkok setinggi 1,5 m yang sebelumnya di pagar besi cat berwarna putih oleh warga setempat. | Foto: Washilah - Heni Handayani

leluhur lengkap dengan sesaji berupa makanan, wangi-wangian, uang, dupa yang dinyalakan. Mereka melepaskan ayam, duduk bersila di atas tikar tradisional, berkonsentrasi, dan memusatkan jiwa dan raga pada leluhur. Mereka meyakini Dewata Seuwa sebagai Tuhan dan melaksanakan ritusnya dengan menyembah kuburan nenek moyang dan batu-batuan.

Irma dan keluarga hingga kini masih trauma karena larangan berziarah ke leluhur. “Kami sekeluarga terpaksa pergi meninggalkan lokasi ziarah padahal tidak melakukan hal yang salah,” ujar

adik ipar Mustakim, Irma kepada Heni Handayani dari Washilah pada 19 Juli 2023 di kediamannya, Sidrap.

Irma mengenang, dua hari setelah perayaan idul fitri 23 Maret 2023, sekelompok pemuda dan orang sepuh berbondong-bondong mendatangi kuburan di atas bukit bernama Buntu Kapere atau Gunung Kafir di Desa Bonto, Kecamatan Malua yang berjarak 37 kilometer dari pusat Kabupaten Enrekang.

Masyarakat menamainya Gunung Kafir karena kuburan tidak menghadap arah barat atau kiblat, melainkan ke timur. Lokasinya juga berada pada puncak bukit, yang kini juga dipergunakan sebagai pekuburan umum warga setempat. Kuburan yang didatangi oleh masyarakat Tolotang terletak paling tinggi ketimbang kuburan lainnya. Luas makam itu dua kali lipat lebih ketimbang kuburan pada umumnya dengan batu nisan setinggi 1,5 m dan nisan lainnya setinggi 1 m.

Mustakim pertama kali berziarah ke kuburan itu pada 2019. Semula warga setempat tidak mempermasalahkan kedatangan mereka saat itu. Setelahnya, Pandemi Covid-19 membuat Mustakim tidak berziarah selama dua tahun.

Ia kembali ke sana Tahun 2022. Kala itu, Mustakim datang



Sitti (85) dari Enrekang datang menemui Walle (70), kerabatnya yang puluhan tahun tidak bertemu karena memutuskan menikah dengan orang Tolotang | Foto: Washilah - Heni Handayani.

bersama keluarga kecilnya, namun ditolak oleh masyarakat setempat.

Saat sekelompok penganut Tolotang tiba di perkuburan, warga setempat yang sebagian besar beragama Islam menolak.

Mereka menyebut ritual orang Tolotang musyrik. Mereka melarang orang Tolotang berziarah dan masuk kompleks pemakaman karena tidak sesuai syariat.

Menurut Mustakim, sebanyak 20 penganut Tolotang Kabupaten Sidrap diusir saat mengunjungi kuburan di Buntu Kapere.

Warga Setempat menyebut kuburan itu Lamunan Nenek Songkok atau dalam bahasa Duri-bahasa daerah setempat yaitu Kuburan Nenek Songkok.

Setelah Heni bertemu dengan Mahaning, Kepala Desa Bonto, Mustakim menjelaskan tujuan penganut Tolotang hanya sekadar ziarah kubur.

Mahaning mengizinkan Mustakim dan penganut Tolotang berziarah dengan syarat tidak membawa apapun yang berhubungan dengan ritual atau budaya mereka.

“Saya sebagai kepala desa tidak mungkin langsung merapat ke salah satu pihak, harus berjalan di tengah-tengah. Tidak ada hak saya melarang. Soal keyakinan kan bukan wilayah saya,” kata Mahaning kepada Heni di Kantor Kecamatan Malua, Enrekang pada 20 Juli 2023.

Mustakim tidak lagi membawa sesajen yang sempat dipermasalahkan oleh warga pada kunjungan selanjutnya. “Baca-baca memang di rumah, nanti disiram di kuburan saat sampai, tidak perlu membawa sesajen dan lain-lain,” katanya dalam bahasa bugis setempat.

Mustakim bercerita suatu hari dia sakit dan kerap bermimpi melihat kuburan leluhurnya. Beberapa kali Mustakim mencoba pengobatan hingga ke rumah sakit. Namun, penyakitnya tak kunjung sembuh.

Uwa—panggilan kehormatan bagi orang yang dituakan masyarakat Tolotang—menyarankan Mustakim menjalani ritual Sipulung.

Mustakim bernazar dan berjanji akan terus berkunjung ke kuburan yang puluhan tahun tidak pernah lagi dikunjungi itu bila ia sembuh.

Masalahnya masyarakat setempat tetap menolak kedatangan penganut Tolotang. Sikri, salah satu warga yang menolak kedatangan penganut Tolotang. “Mending pulang saja, sebelum warga kampung bermain kasar. Mereka tidak boleh keberatan

karena kami yang punya kampung,” kata dia.

Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia UIN Alauddin Makassar, Fadli Andi Natsif, mengatakan warga tak boleh melarang siapapun, termasuk penganut Tolotang untuk berziarah. Makam itu merupakan ruang publik. “Larangan berdoa maupun ziarah melanggar hak orang untuk menjalankan keyakinannya,” kata Fadli.

Kepercayaan Tolotang berasal dari Kabupaten Wajo yang berpusat di Amparita, Sidrap. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar menyebutkan pada abad ke-17 raja Wajo yang bernama Petta Mattoa memeluk Agama Islam. Dia memerintahkan semua masyarakat agar menganut Islam.

Bila tidak mau meninggalkan Tolotang dan menganut Islam, maka orang tersebut diusir dari Wajo sehingga komunitas Tolotang menyebar hingga Amparita, Kanyuara, Otting, dan Dongi. Namun, komunitas ini mayoritas bermukim di Amparita. Keseharian mereka seperti orang Bugis pada umumnya.

Pemeluk kepercayaan ini sekitar 15 ribu jiwa. Komunitas ini diakui oleh pemerintah sebagai aliran kepercayaan pada tahun 1966 berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Sebagian memilih bernaung di bawah agama Hindu sehingga disebut Tolotang Hindu.

Penganut Tolotang yang juga lulusan Manajemen Magister Institut Teknologi & Bisnis Nobel Indonesia, Putri Mentari Syarifuddin, mengungkapkan bahwa kini masyarakat Tolotang berkurang, sekitar 5 ribu jiwa.

“Kurang lebih segitulah, itu karena banyak orang Tolotang yang terbagi dalam aliran Tolotang muslim atau Tolotang Benteng dan aliran tolotang murni atau Hindu,” katanya.

*\*\*Liputan ini menjadi bagian dari program pelatihan dan hibah Story Grant “Anak Muda Ciptakan Ruang Aman Keberagaman di Media” yang dilaksanakan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK). Terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab SEJUK dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID, atau pemerintah AS.*

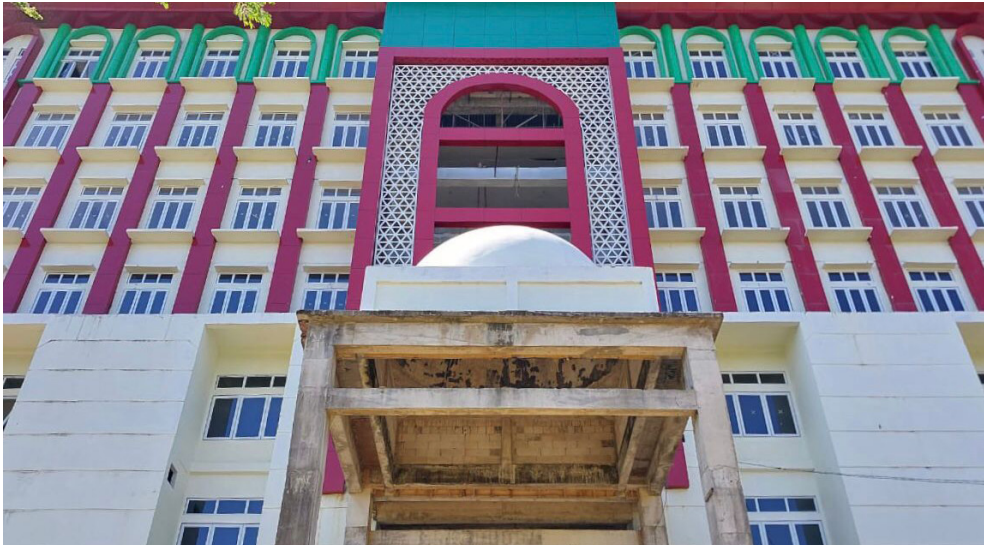
*\*Penulis: Heni Handayani  
\*Editor: Irham Syahril*



Lima penganut Tolotang (sebelah kanan dan kiri) dan satu warga Enrekang (tengah) berkumpul di Saladan-tempat duduk daerah setempat, Kanyuara, Sidrap, Rabu (19/07/2023). | Foto: Washilah - Heni Handayani.

# Pembangunan Gedung Pascasarjana Tak Kunjung Rampung

**Washilah** – Pembangunan Gedung Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dimulai sejak 2015 silam, pengerjaannya hanya sampai empat lantai pada 2018. di tahun berikutnya pengerjaannya dilanjutkan kembali hingga delapan lantai setelah mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Agama sebanyak Rp5 miliar. Gedung yang terletak pada sisi kiri jalan keluar gerbang I UIN Alauddin Makassar pengerjaannya kembali berhenti padahal pembangunannya belum rampung, Jumat (11/8/2023).



Pembangunan gedung Pascasarjana yang belum rampung, depan gedung itu sudah dicat dengan warna khas UIN Alauddin Makassar yang didominasi merah, hijau dan cream.



Di lantai delapan, belum dipasang plafon hanya terdapat rangka. Sampah juga terlihat berserakan, mulai dari sampah plastik hingga sisa bahan bangunan.



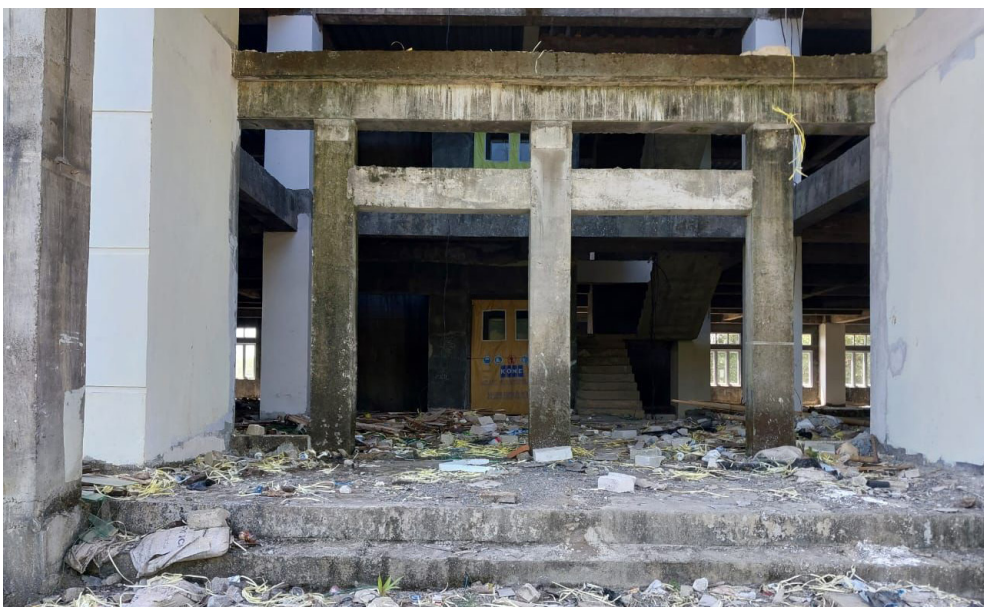
Nantinya gedung ini menggunakan lift sebagai penghubung antar lantai, dua ruangan untuk lift tepat berada di samping tangga.



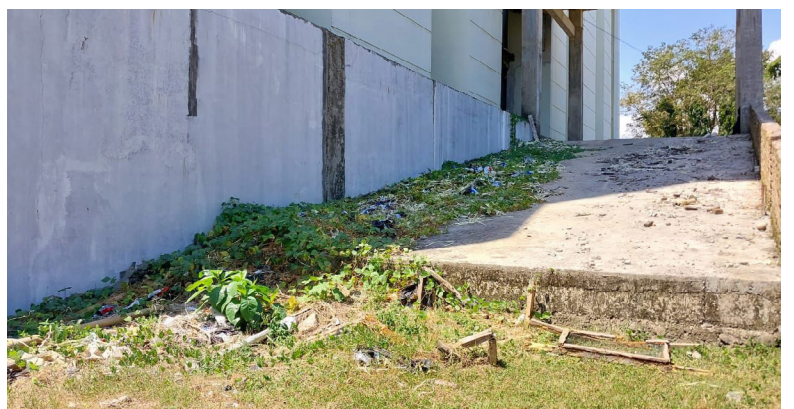
Pada 2018 lalu, pengerjaannya hanya sampai empat lantai saja, lalu dilanjutkan kembali pada Mei 2019. Namun belum juga rampung, keramik belum dipasang, ruangan belum dicat dan kabel instalasi belum terpasang.



Terdapat tiga lantai yang sudah di pasang keramik yakni lantai lima, enam, dan tujuh. selain itu toiletnya juga telah dilengkapi urinoir.



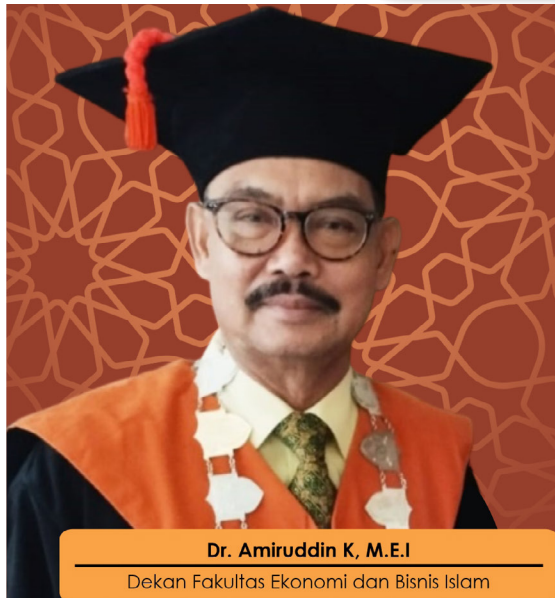
Pintu utama Gedung Pasca terdiri dari tiga tiang yang sudah berlumut, delapan tahun pembangunan akses masuk baru sebatas rangka.



Di bagian luar gedung menuju pintu utama berantakan dan di sisi kiri telah ditumbuhi rumput liar.

*\*Foto & Teks: Aa Min Abduh (Magang)*

*\*Editor: Charissa Azha Rasyid*



Dr. Amiruddin K, M.E.I

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## PIMPINAN DAN CIVITAS AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Mengucapkan

*Selamat*  
**Dies Natalis Ke-58  
UIN Alauddin Makassar**



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



## Rektor & Sivitas Akademika Universitas Islam Makassar



Mengucapkan



Dr. Ir. Ahmad Hanafi, ST., MT.

Wakil I Universitas Islam Makassar



Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

Rektor Universitas Islam Makassar



Badruddin Kaddas, S.Ag., M.Ag., Ph.D

Wakil II Universitas Islam Makassar



Ahmad Najib, S.Ag., M.Pd.

Kepala Biro Universitas Islam Makassar

**Selamat Dies Natalis Ke-58 Tahun  
UIN Alauddin Makassar**

“Bersinergi Majukan Kampus, Berenergi Jayakan Bangsa”



Sivitas Akademika  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Mengucapkan

**Selamat Dies Natalis  
UIN Alauddin Makassar Ke-58 Tahun**



Dr. Muhaemin Latif, M.Th.I., M.Ed

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dr. Wahyuni, S.Sos., M.Si

Wadek I Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dr. Hj. Darmawati, H., M.Hi

Wadek II Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Syahrir Karim, M.Si., Ph.D

Wadek III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat